

20
24



Ace
14/2-2025

LAPORAN KINERJA

WRITTEN BY :
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA (LKj)

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Painan, 26 Februari 2025
Inspektur,

Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak. M.Ec. Dev.
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19780528 200501 2 004

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perikanan dan Pangan pada Tahun Anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 di sektor Perikanan dan Pangan.

Penyajian Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Dinas Perikanan dan Pangan baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tugas tahun anggaran 2024.

Demikian Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Pesisir Selatan dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan menjadi sumber informasi masyarakat pada umumnya, terima kasih.



Paiman, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan

FIRDAUS, S.Pi. M.Si
NIP. 19700621 199303 1 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan tujuan pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Kedudukan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mewujudkan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai evaluasi kinerja satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024

atas dasar kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan evaluasi kinerja ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan Dinas Perikanan dan Pangan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Perikanan dan Pangan serta sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawaban serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2024. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mencakup hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategia yang telah dicapai selama tahun 2024.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3 Gambaran Organisasi

1.3.1 Kedudukan

Kedudukan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk mewujudkan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten pesisir selatan, Dinas Perikanan dan Pangan merupakan unsur pemerintahan

di bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Dinas;
- b. Pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup Dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup Dinas;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten pesisir selatan. Struktur organisasi pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan pangan. Dinas Perikanan dan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan pengelolaan pembudidaya ikan.

2. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan pengelolaan pembudidaya ikan;
3. Pelaksanana evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan pengelolaan pembudidaya ikan;
4. Perumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
7. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
8. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
9. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
10. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengdalikan, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan lingkup Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan dilingkungan Dinas;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas;
3. Penyelenggaraan koordinasi program kerja Dinas;
4. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
5. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan dilingkungan Dinas;
7. Pengelolaan Asset yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

(a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggungjawab Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan

- serta tata usaha pegawai;
2. Penyiapkan penataan organisasi dan tata laksana;
 3. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
 4. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan Gedung, sarana dan prasarana lingkungan Dinas;
 5. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penetausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara lingkungan Dinas;
 6. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
 7. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang;
 8. Penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan
 9. Pelaksanana fungsi lain yang diberikan olehn pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
2. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan, dan produksi usaha budidaya;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan, dan produksi usaha budidaya;
5. Pelaksanaan Analisa kebutuhan pengembangan kegiatan/ pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
6. Penerbitan rekomendasi penerimaan bantuan Masyarakat pembudidaya di bidang perikanan budidaya baik bantuan propinsi maupun pusat;
7. Penyiapan bahan rancangan teknis dan bahan pedoman/ panduan teknis di bidang perikanan budidaya;
8. Pelaksanaan Analisa dokumen dampak lingkungan terkait perikanan budidaya;
9. Penilaian Lokasi budidaya sesuai dengan masterplan/rencana program investasi jangka menengah dan melakukan pemantauan Lokasi sentra perikanan budidaya yang terintegrasi;
10. Pelaksanaan Analisa mutu pakan ikan yang beredar dan melakukan pemantauan penggunaan bahan baku/formulasi pakan ikan/pakan alami;
11. Pelaksanaan Analisa usaha budidaya, perlindungan usaha pembudidaya ikan, sarana pembudidaya ikan serta memfasilitasi terbentuknya kemitraan/kelembagaan pembiayaan usaha budidaya;
12. Pemeliharaan dan perbaikan keseimbangan antar faktor lingkungan, ketahan ikan serta hama penyakit ikan dengan pelaksanaan pencegahan, pengobatan dan pengaturan pemakaian obat ikan;
13. Pelaksanaan kodefikasi, validasi, verifikasi pemutakhiran dan tabulasi data primer/sekunder;

14. Pelaksana evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang Kawasan dan Kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan dan produksi usaha budidaya; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Bidang Pemberdayaan Nelayan

Bidang Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan nelayan memiliki fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan nelayan dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan fasilitas, koordiansi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan nelayan dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
5. Pelaksana penguatan kelembagaan dan perlindungan nelayan dan usaha nelayan kecil, serta memfasilitasi terbentuknya kemitraan/kelembagaan pembiayaan usaha nelayan kecil;
6. Penerbitan rekomendasi penerimaan bantuan masyarakat nelayan dibidang perikanan tangkap baik bantuan propinsi, maupun pusat;

7. Penerbitan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak untuk nelayan kecil;
8. Pelaksana pembinaan diversifikasi usaha, pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan dan penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan;
9. Pengumpulan harga komoditi kelautan dan perikanan;
10. Pelaksanaan kodefikasi, validasi, verifikasi pemutakhiran dan tabulasi data primer/sekunder;
11. Pelaksana analisis data pelaku usaha dan kemitraan dibidang pengolahan dan pemasar hasil/produk kelutan dan perikanan secara deskriptif;
12. Pelaksana analiisa kebutuhan ikkan konsumsi dan atau preferensi konsumen sebagai bahan rekomendasi;
13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina mutu produk hasil perikanan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

E. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan dan distribusi pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan dan distribusi pangan, menyiapkan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
2. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan dan distribusi pangan;

3. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan dan distribusi pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan dan distribusi pangan;
5. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan dan distribusi pangan
6. Penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan dan distribusi pangan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan..

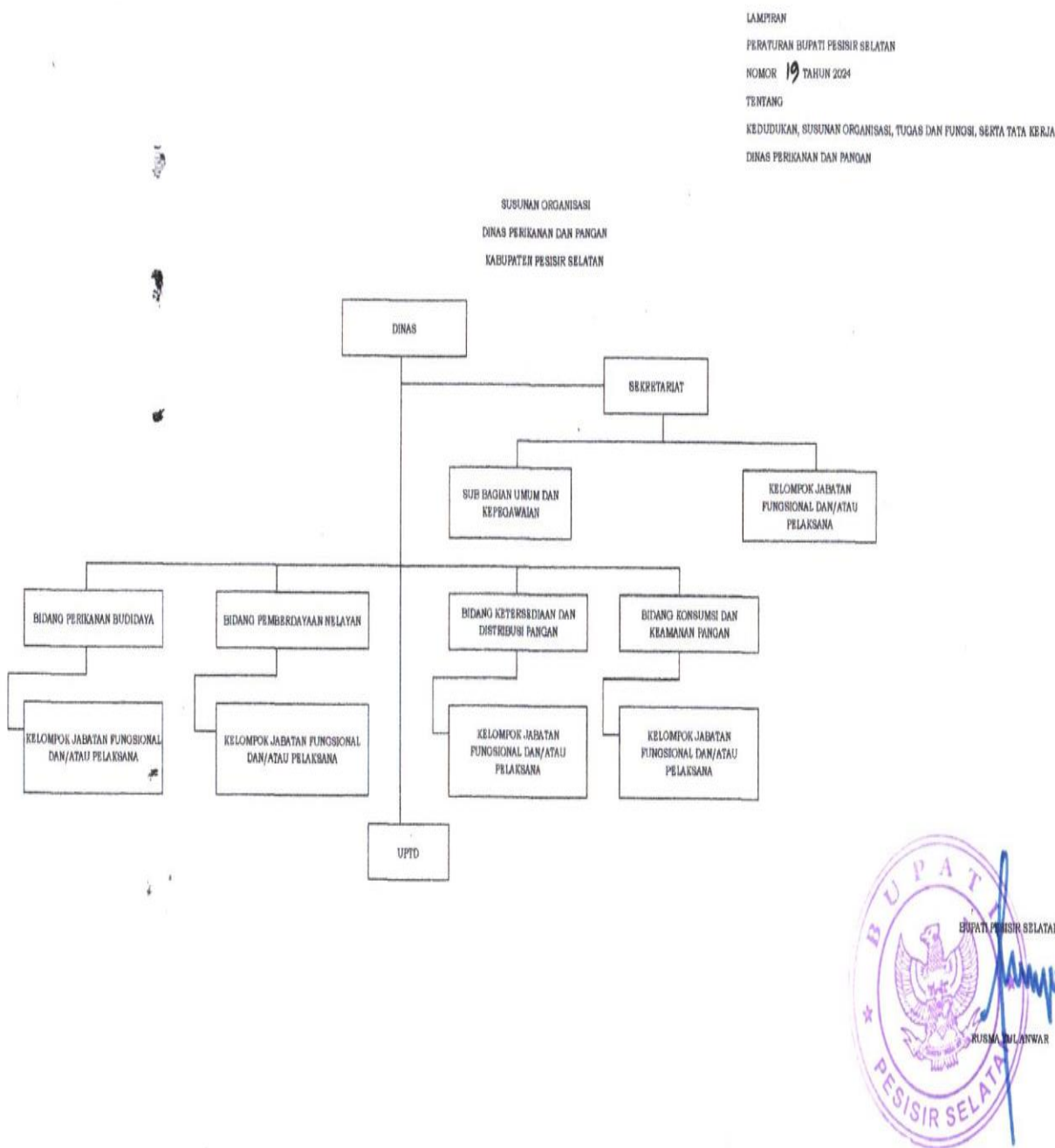
F. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan..

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Kesekretariatan dan 4 Bidang. Bagan SOTK Dinas Perikanan dan Pangan dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PANGAN (Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 19 Tahun 2024)



1.3.4 Sumber Daya Manusia

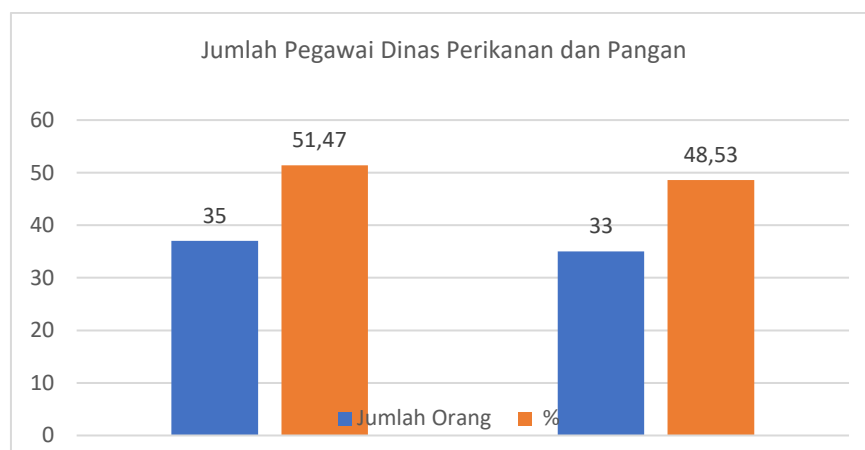
Adapun Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024, sebanyak 68 orang, terdiri dari 35 orang ASN dan 33 orang Tenaga Honorar (Non ASN), dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Status PNS	Jumlah (Orang)	%
1.	ASN	35	51,47
2.	Non ASN	33	48,53
Jumlah		68	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Grafik 1.1
Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024



Tabel diatas menggambarkan bahwa aparatur Dinas Perikanan dan Pangan terdiri dari ASN dan non ASN dengan persentase 51,47 % ASN dan 48,61% Non ASN.

Sumber Daya manusia Dinas Perikanan dan Pangan dikelompokkan dalam 4 (empat) keadaan, yaitu :

- a. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin

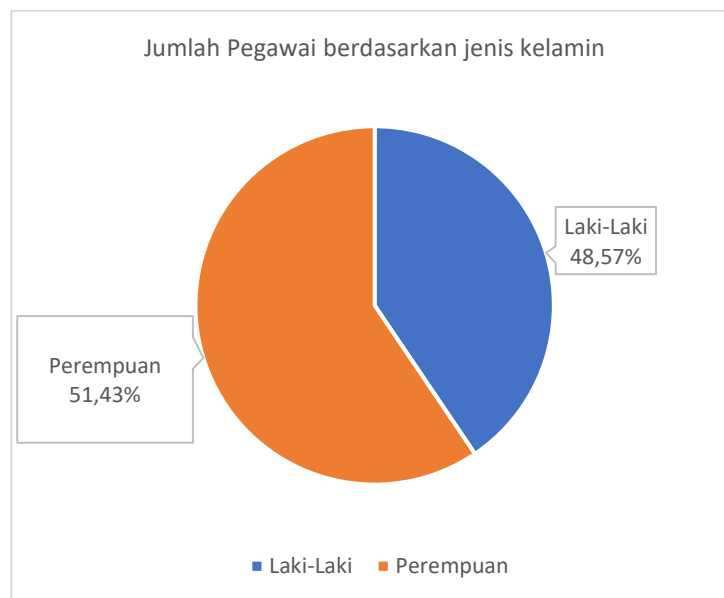
Keadaan Pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1.	Laki-laki	17	48,57
2.	Perempuan	18	51,43
Jumlah		35	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



b. Keadaan pegawai berdasarkan golongan

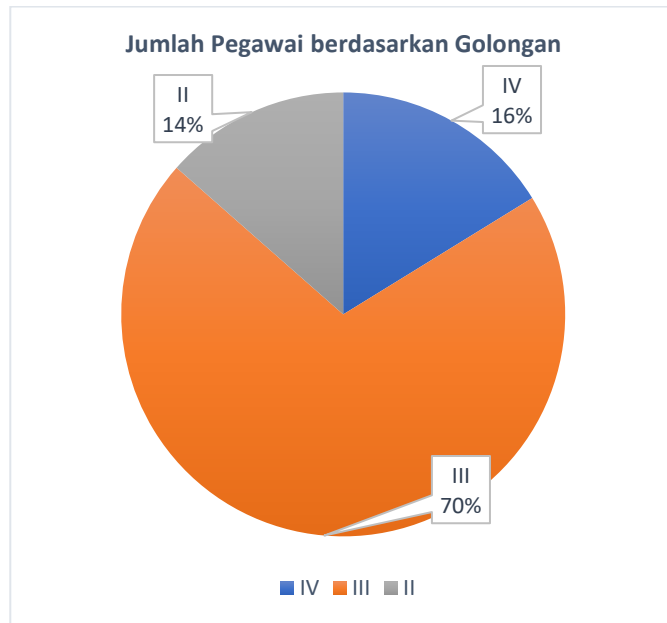
Dari 37 PNS Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pegawai golongan III yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	IV	6	16,22
2.	III	26	70,27
3.	II	5	13,51
Jumlah		37	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Grafik 1.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pegawai golongan IV sebanyak 6 orang atau 16,22 %, golongan III sebanyak 26 orang atau 70,27 % dan golongan II sebanyak 5 atau 13,51%.

c. Keadaan pegawai berdasarkan Pendidikan

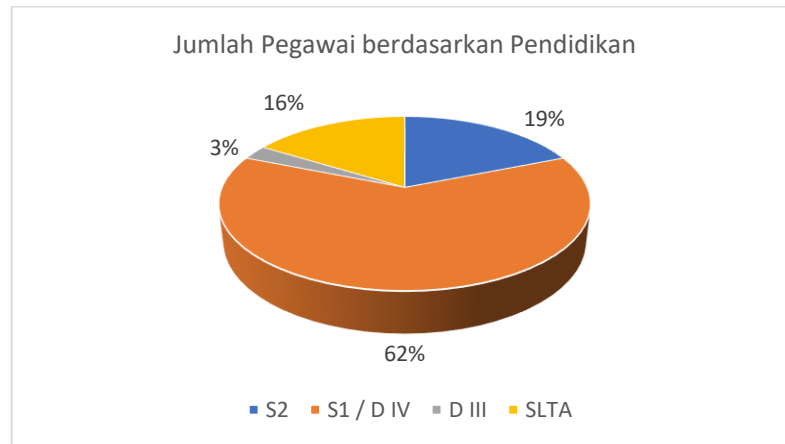
Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka status pendidikan sarjana lebih mendominasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata 2 (S2)	7	18,92
2.	Strata 1 (S1)/DIV	23	62,16
3.	Diploma (DIII)	1	2,70
4.	SLTA	6	16,22
Jumlah		37	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Grafik 1.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



1.4 Aspek Strategis Organisasi

Peran strategis Dinas Perikanan dan pangan Kabupaten Pesisir Selatan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Perikanan dan Pangan, mengisi pembangunan Perikanan dan Pangan dengan menyelaraskan dan menjalankan misi – misi yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah : ***“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional”***. Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka tugas pokok

dan fungsinya Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan secara langsung mendukung agenda Prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang kedua dan ketiga yaitu :

Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan Masyarakat

Misi 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terjadi pemutakhiran Program dan Kegiatan, sehingga Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan dalam mendukung RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui 8 (delapan) program adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 3) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 5) Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 6) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 7) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 8) Program pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1.5. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Isu strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Adapun yang menjadi isu strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

a. Bidang Perikanan

1. Pemanfaatan lahan usaha perikanan yang tidak sesuai dengan tataruang dan wilayah.

2. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya.
3. Masih rendahnya pengetahuan dan kualitas kelembagaan usaha.
4. Masih belum terpenuhinya kebutuhan benih dan calon induk untuk usaha budidaya air tawar.
5. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap.
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap.
7. Rendahnya daya saing pengolah dan pemasar hasil perikanan
8. Masih rendahnya pengetahuan dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

b. Bidang Pangan

1. Belum terpenuhinya komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang telah disepakati sebesar 100 ton.
2. Belum adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah. Gejolak harga dan pasokan pangan sampai saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan, hal ini dapat menyebabkan keresahan sosial dan inflasi. Intervensi kebijakan pemerintah belum sepenuhnya menyentuh produsen dan konsumen (masyarakat) untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan strategis seperti cabe, bawang merah, bawang putih, jengkol dan komoditi lainnya.
3. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Hal ini dapat dilihat masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras.
4. Belum berkembangnya pangan alternatif dan teknologi industri pengolahan pangan berbasis pangan lokal.

1.6. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan dan Pangan ini menjelaskan tentang capaian kinerja tahun 2024 dan dipersandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian

kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Adapun susunan sistematika penyajiannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menyajikan gambaran organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur organisasi dan Sumberdaya manusia. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini menyajikan penjelasan secara ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja yang akan dicapai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja sasaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2024. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

2.1 RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional, serta mengakomodir visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

V I S I

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional”

Sejahtera mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;

Maju mengandung makna membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, dukung sumberdaya manusia yang unggul, professional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;

Bermartabat mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ASB-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah);

Akuntabel mengandung makna tanggung jawab yang bersifat objektif dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan

seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;

Profesional mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, ditetapkan lima Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Dalam mencapai Visi Misi Kepala Daerah yang terpilih Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada Misi kedua dan ketiga yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat dan Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.

2.2 Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Perikanan merupakan dokumen yang menjelaskan secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator
Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1.	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya yang Pemerintahan Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,5)
			Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100
2.	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	87
3.	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan	50.694

Sumber : Perencanaan Tahun 2024

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menjabarkan dalam empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan sesuai periode Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Adanya rasionalisasi Target Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 telah dilakukan rasionalisasi target Capaian Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 pada Bab IV tentang target kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk Berita Acara Rasionalisasi Rencanan Strategis (Renstra).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi diantaranya Evaluasi Reformasi Birokrasi tidak dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah. Sehubungan peraturan tersebut, maka dilakukan Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 050/1132.1/Bapedalitbang/2023 tanggal 25 Oktober 2023 perihal Revisi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah, yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Rasionalisasi Renstra Tahun 2021-2026
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TAHUN						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatkan Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$	46.168	48.977	49.818	50.693	51.604	52.553	RPJMD	Urusan Perikanan
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentasi Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras / jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Rata Jumlah Ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	95	100	100	100	100	100	RPJMD	Urusan Pangan
Meningkatnya Pengankaragaman Konsumsi Pangan	Tingkat Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari)	$\frac{\text{Jumlah energi rumah tangga per hari}}{\text{Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)}}$	2.250	2.225	2.200	2.175	2.150	2.150	RPJMD	Urusan Pangan
	Tingkat Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)	$\frac{\text{Jumlah protein rumah tangga per hari}}{\text{Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)}}$	61,45	60,34	59,28	58,11	57,00	57,00	RPJMD	Urusan Pangan

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Rasionalisasi Renstra Tahun 2021-2026
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian Inspektorat Daerah			A	A	A	A
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA			100	100	100	100
Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	$\frac{\text{Jumlah skor pph}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times 100\%$			82	84	85	87
Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	$(\text{Produksi} \times \text{Harga Olahan}) - (\text{Produksi} \times \text{harga bahan baku})$			85.885.000.000	86.035.000.000	86.235.000.000	86.485.000.000

Pada akhir tahun 2023 dilaksanakan evaluasi dan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 lingkup Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dikoordinir oleh Bapedalitbang. Dari hasil evaluasi tersebut maka pada Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2024 dilakukan perubahan.

1. Perubahan indikator kinerja utama (IKU) dari "Nilai Tambah Produksi Hasil Perikanan" menjadi "Jumlah Produksi Perikanan" dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 dilakukan

untuk lebih menyesuaikan dengan fokus kebijakan sektor perikanan. Beberapa alasan utama perubahan ini meliputi:

- Kebutuhan untuk meningkatkan akurasi dan kemudahan pengukuran kinerja.
- Perubahan kebijakan atau strategi dalam pengelolaan sektor perikanan.
- Penyesuaian dengan sistem pelaporan yang lebih sederhana dan kuantitatif.
- Meningkatkan keterukuran pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam mendukung produksi perikanan.

2. Perbandingan Karakteristik Indikator

Aspek	Nilai Tambah Produksi Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan
Definisi	Mengukur peningkatan nilai ekonomi dari produk perikanan setelah diproses atau dikembangkan	Mengukur total produksi perikanan dalam satu periode
Metode Pengukuran	Berdasarkan nilai tambah dari pengolahan hasil perikanan	Berdasarkan volume produksi ikan (ton, kg, atau unit lainnya)
Keunggulan	Menunjukkan dampak ekonomi dari produksi perikanan	Lebih mudah diukur dan dipantau
Kelemahan	Sulit diukur secara langsung dan memerlukan data ekonomi tambahan	Tidak mencerminkan nilai ekonomi atau kualitas hasil produksi

3. Dampak Perubahan

- Terhadap Kebijakan: Pergeseran fokus dari nilai tambah ke produksi mengindikasikan bahwa kebijakan saat ini lebih menitikberatkan pada peningkatan kuantitas produksi dibandingkan aspek ekonomi dan pengolahan.
- Terhadap Pelaksanaan Program: Program akan lebih diarahkan pada peningkatan produksi perikanan dengan target volume tertentu, dibandingkan dengan pengembangan industri pengolahan.
- Terhadap Pelaporan dan Evaluasi: Pengukuran kinerja akan lebih sederhana dan berbasis data produksi dari unit terkait, seperti dinas perikanan dan statistik produksi perikanan.
- Terhadap Stakeholder: Nelayan dan pelaku usaha perikanan akan lebih fokus pada peningkatan hasil tangkapan atau budidaya dibandingkan pengembangan produk bernilai tambah.

Tabel 2.4
Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian Inspektorat Daerah			A (81)	A (81,5)	A (82)	A (82,5)
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA			100	100	100	100
Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	$\frac{\text{Jumlah skor pph}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times 100\%$			82	84	85	87
Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan	Jumlah Produksi tahun (n)			53.945	50.694	51.604	52.553

Sumber : Perencanaan Tahun 2024

Perubahan sasaran pada IKU dari "Nilai Tambah Produksi Hasil Perikanan" menjadi "Jumlah Produksi Perikanan" mencerminkan pergeseran fokus kebijakan sektor perikanan ke arah peningkatan produksi. Meskipun lebih mudah diukur, perubahan ini juga memiliki konsekuensi terhadap kebijakan dan strategi pengembangan sektor perikanan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang agar produksi meningkat tanpa mengesampingkan nilai tambah ekonomi dari sektor ini.

Untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan perikanan dan pangan di kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Kegiatan Pendukung Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran/Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Terwujudnya yang Pemerintahan Akuntabel dan Berkinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
				Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
			Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kaupaten /Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
3.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
			Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
4.	Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis 2021-2026. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah Menyusun Rencana Kinerja Tahun 2024 dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.6
Rencana Kinerja Tahunan 2024
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dan Pangan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81,5)
2		Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Tanpa Satuan	87
4	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	50.694

2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Penetapan Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang telah ditetapkan berpedoman pada Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan	A (81,5)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100
3	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,0
4	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	50.694

Untuk mewujudkan perjanjian kinerja tersebut, Dinas Perikanan dan Pangan melaksanakan 6 program dengan 16 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 11.072.645.124,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.8
Program dan Anggaran Tahun 2024
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.437.042.978
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	560.793.415
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	62.514.900
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.575.288.307
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	374.115.974
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	62.889.550
	Jumlah	11.072.645.124

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



kuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah perwujudan kewajiban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

3.1.1 Metode Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan skala pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran
Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan					
Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi					
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,50)	A (81,46)	99,95
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	93	93
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat					
Tujuan 2 : Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat					
2	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	87,00	88,20	101,37
Misi 3: Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah					
Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan					
2	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah produksi perikanan (ton)	50.694	60.942,68	120,22
	Rata-rata capaian				103,63

Catatan : *) : Angka realisasi Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Dari tabel 3.2. dapat dilihat bahwa ke 4 (empat) indikator yang ditetapkan tahun 2024 terlihat rata-rata capaian indikator kinerja sudah mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu :

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perikanan dan Pangan dengan nilai 81,46 (A) dari target 81,50 (A) atau dengan predikat “memuaskan”.
- 2) Hasil pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan realisasi 88,20 dari target yang ditetapkan 87 atau dengan capaian 101,37 %. hal ini menunjukkan bahwa semakin beragamnya pangan yang dikonsumsi Masyarakat.
- 3) Jumlah Produksi Perikanan dengan realisasi 60.942,68 dari target 50.694 dengan capaian 120,22 %.
- 4) Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah 93 dari target nilai 100.

Capaian rata-rata ke 4 (empat) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 103,63% atau melebihi target yang telah ditetapkan, keberhasilan pencapaian ini termasuk kategori “sangat baik”

Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada tahun 2024 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan 6 (enam) program pendukung dengan realisaswi seperti tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Program Pendukung Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Program	APBD Tahun 2024 (Rp)	APBD Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.122.275.538	5.437.042.978	5.049.607.393	92,87	387.435.585
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	313.395.910	560.793.415	498.994.504	88,98	61.798.911
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	62.514.900	62.514.900	53.735.350	85,96	8.779.550
4.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.475.288.407	4.575.288.307	4.403.263.143	96,24	172.025.164
5.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	374.116.084	374.115.974	369.651.825	98,81	4.464.149
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	42.889.550	62.889.550	62.726.100	99,74	163.450
	Jumlah	10.390.480.389	11.072.645.124	10.437.978.315	94,27	634.666.809

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Keberhasilan pencapaian tersebut, menunjukkan kesungguhan dan komitmen Dinas Perikanan dan Pangan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang peikanan dan pangan tahun 2024.

3.1.3 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2021-2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran. Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran.

Hasil Pengukuran Sasaran Strategis pada Target RPJMD tahun 2021-2026

Dalam mewujudkan misi 1, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran. Selanjutnya uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian sasaran strategis secara sistematis disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Instansi Dinas Perikanan dan Pangan.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2024

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja 1 dapat disajikan sebagaimana tercantum pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator kinerja
Sasaran 1 Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81,50)	A (81,46)*	99,95
	Jumlah					99,95

Catatan : *) Hasil Evaluasi Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perikanan dan Pangan dengan nilai A atau 81,46 dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang dinilai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator kinerja
Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 - 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	A (81,50)	A (80,97)	A (81,46)	99,96	99,95

Catatan : *) Hasil Evaluasi Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023
Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,46)	A (82,50)	98,73

Catatan : *) Hasil Evaluasi Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023
Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7
Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Pesisir Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar	Kementerian Kelautan Dan Perikanan R I
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,46)	A (80,54)	84,01

Catatan : *) Hasil Evaluasi Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023

Sumber : 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar

2. Dinas Pamngan Prov. Sumbar

3. Kementerian Kalutan dna Perikanan RI

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satua	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis	Solusi yang Dilakukan
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81,50)	A (81,46)*	99,95	belum optimalnya evaluasi internal secara berkala	-Pengelolaan SDM -Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja -Struktur Tata Kelola -Budaya dan Hubungan Organisasi

Catatan : *) Hasil Evaluasi Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja dengan Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah, diperlukan sumber daya yang memadai,mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 3.9
Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran Strategis 1

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan (20 orang Analis Ketahanan Pangan dan 30 orang pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan)	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara jumlah (9 orang Analis Ketahanan Pangan dan 15 orang pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan)	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal dicapai
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis,	Masih belum terpenuhinya anggaran untuk mencapai target yang ada seperti cadangan pangan yang harus disediakan dan bantuan bibit/benih bermutu	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program unggulan daerah
Tercukupinya Sarana dan Prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya perbaikan Gedung kantor, penambahan mobile dan peralatan kantor	Optimalisasi penggunaan Sarana dan prasarana yang ada

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja dengan Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 5.437.042.978,- dan terealisasi Rp. 5.049.607.393,- (93,87%). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar uraian tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Dukungan APBD untuk Pencapaian Sasaran Strategis 1

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	Realisasi			Sisa Anggaran
			Keuangan	%	Fisik (%)	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.437.042.978	5.049.607.393	92,87	100,00	387.435.585
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.188.418	59.189.452	98,34	100,00	998.966
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.188.418	59.189.452	98,34	100,00	998.966
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.504.365.292	4.140.611.767	91,92	100,00	363.753.525
	6 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.281.945.292	3.937.203.111	91,95	100,00	344.742.181
	7 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210.260.000	191.252.336	90,96	100,00	19.007.664
	8 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.160.000	12.156.320	99,97	100,00	3.680
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.331.850	404.298.064	97,34	100,00	11.033.786
	10 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.860.400	11.848.840	99,90	100,00	11.560

	11	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.095.090	39.093.965	100,00	100,00	1.125
	12	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.332.310	27.573.840	97,32	100,00	758.470
	13	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	4.104.000	76,00	100,00	1.296.000
	14	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.005.000	3.427.500	68,48	100,00	1.577.500
	15	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.553.000	295.449.919	98,63	100,00	4.103.081
	16	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.086.050	22.800.000	87,40	100,00	3.286.050
5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.837.418	235.791.614	95,53	100,00	11.045.804
	17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	101.400.000	91.355.919	90,09	100,00	10.044.081
	18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.437.418	144.435.695	99,31	100,00	1.001.723
6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.320.000	209.716.496	99,71	100,00	603.504
	19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.600.000	56.029.704	98,99	100,00	570.296
	20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.700.000	109.686.792	99,99	100,00	13.208
	21	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.100.000	22.100.000	100,00	100,00	-
	22	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.920.000	21.900.000	99,91	100,00	20.000
		JUMLAH	5.437.042.978	5.049.607.393	92,87	100,00	387.435.585

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, dihitung dengan menggunakan rumus Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017) tertuang dalam Lampiran V Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020, yaitu :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(5.437.042.978 \times 99,95 \%) - 5.049.607.393}{(5.437.042.978 \times 99,95 \%) } \times 100\% \\ &= 7,079\% \end{aligned}$$

Dari rumusan di atas diketahui bahwa efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah 7,079% dari

ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024 adalah A (81,50), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023 sebesar A (81,46) serta untuk capaian kinerja sebesar 99,95%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,6 % apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar A (80,97).

Gambar 3.1 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,97
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,19
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,80
4	Evaluasi Internal	25,00	22,50
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		81,46
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

- 1) Perencanaan Kinerja
 - a. melakukan penyesuaian target pada PK untuk target-target yang telah tercapai melebihi target ditahun berikutnya yang telah tertuang dalam realisasi kinerja tahun sebelumnya
 - b. melakukan monitoring kinerja atas Rencan Aksi setiap bulan, triwulan dan semester dengan membuat laporan monitoring tentang kriteria :
 1. Capaian target rencana aksi secara periodic dipantau kemajuannya.
 2. Setiap deviasi atas aksi dilaksanakan segera analisis dan dicarikan alternatif solusinya.
 3. Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan nujntuk mengetahui progress kerja terbaru.
- 2) Pelaporan Kinerja
 - a. Data Pembanding Nilai AKIP Perangkat daerah dan Nilai Kematangan Inovasi Daerah;

Bekinerja” dengan indicator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan dengan target A (81,50) dengan realisasi A (81,46) dengan pencapaian kinerja 99,95 %.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 telah melaksanakan 1 program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, SubKegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu; dan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.049.607.393,- atau 92,87 % dari total anggaran sebesar Rp. 5.437.042.978,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 7,13%.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) Indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11
Sasaran Strategis 2 Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	93.00	93.00
	Jumlah			93.00

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa inovasi yang dilakukan oleh bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan tentang Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan makan ikan), pemanfaatan inovasi dalam kegiatan : Sosialisasi Gemarikan di Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir dan Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten Pesisir Selatan, hal ini terlihat dari data AKI Tahun 2022 (47,38 kg/kapita) meningkat pada Tahun 2023 (47,51 kg/kapita). Penurunan angka Stunting Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2022 (29,8%) dan setelah adanya Inovasi angka stunting pada tahun 2023 (27%). Dari hasil inovasi tersebut nilai kematangan inovasi Dinas Perikanan dan Pangan adalah 93.00.

a. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.12 dibawah ini.

Tabel 3.12
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 2 Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100	93.00	93.00
Rata-Rata Capaian						93.00

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100.00	100.00	63.00	93.00	63	93

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Dari Tabel 3.13 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 47,61 % dari 63.00 pada Tahun 2023 menjadi 93,00 pada Tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.14 dibawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikastor Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	93.00	100	93.00

Sumber :Data Susenas BPS Tahun 2024

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15

No .	Sasaran	Indikator Kinerja	Satua	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100	93.00	93.00	Dengan adanya inovasi gemarikan semakin meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) dan penurunan angka stunting	Semakin ditingkatkannya kematangan inovasi untuk tahun berikutnya

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Gambar 3.3. Nilai kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024



f. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan pangan tahun 2025

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran ini mencakup alokasi penganggaran yang tepat, serta dukungan dari pemerintah daerah. Penggunaan sumber daya yang efisien berkontribusi pada hasil yang optimal dalam program-program yang dilaksanakan.

Tabel 3.16
Dukungan APBD untuk Pencapaian Sasaran Strategis 2

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	Realisasi			Sisa
			Keuangan	%	Fisik (%)	Anggaran
F	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	62.889.550	62.726.100	99,74	100,00	163.450
16	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	6.889.550	6.838.600	99,26	100,00	50.950
	34 Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	6.889.550	6.838.600	99,26	100,00	50.950
17	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	56.000.000	55.887.500	99,80	100,00	112.500
	35 Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	56.000.000	55.887.500	99,80	100,00	112.500
	JUMLAH	62.889.550	62.726.100	99,74	100,00	163.450

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(62.889.550 \times 93 \%) - 62.726.100}{(62.889.550 \times 93 \%) } \times 100\% \\ &= - 7,25\% \end{aligned}$$

Dari rumusan di atas diketahui bahwa efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah 7,25% dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu : Program Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Realisasi program/kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan adalah sebesar Rp. 62.726.100,- atau 99,74% dari total anggaran sebesar Rp. 62.889.550,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0,26%.

Dalam mewujudkan misi 2, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran. Selanjutnya uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian sasaran strategis secara sistematis disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu pencapaian Skor Pola Pangan harapan (PPH).

Pencapaian tingkat konsumsi baik energi maupun protein dalam 5 tahun terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Perbandingan Skor PPH Kabupaten Pesisir Selatan dengan
Skor Maksimal PPH (tahun 2021,2022, 2023,2024)

No	Kelompok pangan	Skor Maks PPH	Skor PPH 2021	Skor PPH 2022	Skor PPH 2023	Skor PPH 2024
1	Padi-padian	25,0	25,0	25.0	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	2,5	0,7	0.6	0.8	0.6
3	Pangan Hewani	24,0	18,9	19.5	20.9	21.9
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5.0	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	1,0	1.0	1.0	1.0
6	Kacang-kacangan	10,0	2,5	4.4	4.9	4.3
7	Gula	2,5	1,8	1.8	1.6	1.6
8	Sayur dan Buah	30,0	25,6	29.6	29.7	28.8
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah	100,0	80,4	86.9	88.9	88.2

Keterangan: 1) AKE di tingkat konsumsi adalah 2.000 kkal/kap/hari (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII, 2004);
 2) AKE di tingkat konsumsi adalah 2.100 kkal/kap/hari (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI, 2018);
 3) Bobot kelompok pangan digunakan untuk penghitungan skor PPH nasional dan regional.
 4) Data diolah oleh GMSK-IPB dan Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan, 2004.
 5) Skor PPH Regional digunakan sebagai standar/acuan komposisi pangan ideal Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat
 6) Kisaran persentase energi terhadap AKG (FAO-RAPA, 1989) sebagai acuan menuju komposisi pangan ideal.

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \text{Skor PPH} &= \frac{\text{Jumlah Skor PPH}}{\text{Jumlah Skor Maximum}} \times 100\% \\
 &= \frac{88,2}{100} \times 100 \% \\
 &= 88,2 \\
 \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{88,2}{87} \times 100\% = 101,37 \%
 \end{aligned}$$

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa kelompok pangan masih dibawah skor maksimum PPH, tetapi meningkat dibandingkan 4 tahun terakhir.

- 1) Kelompok padi-padian cenderung stabil, tingginya konsumsi kelompok padi-padian khusus beras, kemungkinan disebabkan oleh pola makan masyarakat yang masih tergantung pada beras sebagai sumber energi dan didukung oleh produksi dan ketersediaan beras yang cukup tinggi.
- 2) Konsumsi pada 4 (empat) kelompok pangan masih rendah, hal ini kemungkinan disebabkan kebiasaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengkonsumsi pangan, seperti umbi-umbian, karena bukan makanan pokok dan lebih cenderung dijadikan cemilan.
- 3) Masih rendahnya daya beli masyarakat terhadap beberapa bahan pangan seperti, pangan hewani dan kacang-kacangan.

Pentingnya keberagaman konsumsi karena konsumsi pangan yang beragam erat kaitannya dengan konsumsi pangan yang berkualitas, sehingga memenuhi angka kecukupan gizi dan energi. Selain itu, keberagaman konsumsi dapat menekan ketergantungan terhadap komoditas pangan tertentu, khususnya komoditas pangan yang masih mengandalkan impor.

Kesembilan kelompok pangan tersebut merepresentasikan 3 kelompok fungsi pangan bagi tubuh, yaitu :

- a) Sumber karbohidrat atau tenaga (padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan gula),
- b) Sumber protein atau zat pembangun (pangan hewani dan kacang-kacangan), serta
- c) Sumber vitamin dan mineral atau zat pengatur (sayuran dan buah).

Untuk target skor PPH Nasional mengacu pada RPJMN dan usulan dari Badan Pangan Nasional. Sedangkan untuk skor PPH Daerah mengacu pada RPJMD, target nasional, dan usulan Badan Pangan Nasional. Sementara itu, target skor PPH nasional pada tahun 2024 adalah 95,2 dengan capaian 94,1 dengan skor PPH ideal 100. “Diharapkan dengan Perbadan tentang PPH ini dapat dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat termasuk juga pengentasan daerah rentan rawan pangan dan gizi serta pengurangan *stunting*. Saat ini yang pasti Pemerintah semakin serius terhadap gerakan penganekaragaman konsumsi pangan

untuk pemenuhan gizi Masyarakat. Dalam penentuan skor PPH ada indikator yang saling berkaitan atau mempengaruhi yaitu tingkat konsumsi pangan masyarakat.

Tingkat Konsumsi pangan

a. Konsumsi energi

$$\text{Tingkat konsumsi Energi} = \frac{\text{Jumlah energi rumah tangga per hari}}{\text{Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)}}$$

b. Konsumsi protein
 Formulasi :

$$\text{Tingkat konsumsi protein} = \frac{\text{Jumlah protein rumah tangga per hari}}{\text{Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)}}$$

Pencapaian target dan realisasi kinerja tingkat konsumsi tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 3.18
Capaian Tingkat Konsumsi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Konsumsi Pangan :				
	Konsumsi Energi	Kkal/kapita/hari	2.223	2.040	91,77
	Konsumsi Protein	Gram/kapita/hari	59	57,00	96,61
Rata-rata Capaian					94,19

Sumber :Data SusenasBPS Tahun 2024

Pada tabel dapat dilihat bahwa realisasi Tingkat konsumsi energi 2.040 Kkal/kapita/hari terjadi penurunan dari target 2.223 Kkal/kapita/hari pada tahun 2024 dengan capaian 91,77% dan lebih rendah sebesar 2,86 % dari Angka Kecukupan Energi (AKE) Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2018 yaitu 2.100 kkal/kapita/hari. Sedangkan realiasi konsumsi protein 57,00 Gram/kapita/hari terjadi penurunan dari target 59,00 Gram/kapita/hari pada tahun 2024 dengan capaian 96,61%. Namun masih dalam standar Angka Kecukupan Protein (AKP) Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2018 yaitu 57,00 gram/kapita/hari. Artinya konsumsi pangan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan baik Konsumsi Energi maupun Konsumsi Protein telah memenuhi standar konsumsi pangan Nasional.

Tabel 3.19
Perbandingan Capaian Tingkat Konsumsi Pangan
Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Konsumsi Pangan :							
	Konsumsi Energi	Kkal/kapita/hari	2.247	2.115	94,13	2.223	2.040	91,77
	Konsumsi Protein	Gram/kapita/hari	60	57,50	95,83	59	57,00	96,61
Rata-rata Capaian					94,98			94,19

Sumber :Data SusenasBPS Tahun 2024

Dari tabel diatas indikator terkait kinerja Tingkat konsumsi pangan sebagai berikut :

- a. Konsumsi energi tahun 2024 sebesar 2.040 kkal/kap/hari, mengalami penurunan dibanding tahun 2023 (2.115 kkal/kap/hari). Konsumsi energi tersebut juga terjadi penurunan dari standar AKE 2.100 kkal/kap/hari, namun tidak mempengaruhi konsumsi energi kabupaten secara keseluruhan.
- b. Konsumsi protein tahun 2024 sebesar 57,00 gram/kap/hari, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun tahun 2023 (57,50 gram/kap/hari). Meskipun mengalami penurunan, namun sama dengan konsumsi protein penduduk nasional dengan anjuran konsumsi protein sebesar 57 gram/kap/hari.

Perkembangan tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2024 dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.20
Perkembangan Tingkat Konsumsi Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2024

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat konsumsi pangan				
	a. Konsumsi energi (kkal/kapita /hari)	2.420	2.071	2.115	2.040
	b. Konsumsi protein (gram/kapita/ hari)	65	54,4	57,5	57,00

Sumber :Data SusenasBPS Tahun 2024

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa perkembangan capaian konsumsi energi dan protein dari 9 kelompok pangan selama kurun waktu tahun (2021-2024) dapat dilihat hasil sebagai berikut :

1. Konsumsi energi

Berpedoman pada Angka Kecukupan Energi (AKE) Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2018 yaitu 2.100 kkal/ kapita/hari, secara keseluruhan dari ke 9 kelompok pangan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dapat disimpulkan telah normal, seperti

dilihat dari perkembangan Tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2021 tingkat konsumsi energi sebesar 2.420 kkal/kapita/hari melebihi AKE yaitu sebesar 2.100 kkal/kapita/hari artinya rata-rata konsumsi energi dan protein pada rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada kategori normal yaitu 115,24 % AKE pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat konsumsi energi yaitu menjadi 2.071 kkal/kapita/hari. Pada tahun 2023 sebesar 2.115 kkal/kapita/hari artinya pada terjadi penurunan AKE yaitu 98,62 % AKE tahun 2022 dan Kembali normal 100,71 % AKE tahun 2023, pada tahun 2024 terjadi penurunan konsumsi energi yaitu 2.040 kkal/kapita/hari atau 97,14 % dari standar Nasional, namun hal itu tidak mempengaruhi terhadap konsumsi pangan Masyarakat.

2. Konsumsi protein

Angka Kecukupan Protein (AKP) Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2018 yaitu 57 gram/kapita/hari secara keseluruhan dari ke 9 kelompok pangan dalam kurun waktu Tahun 2021 konsumsi protein sebesar 65 gram/kapita/hari. Dan pada tahun 2022 konsumsi protein sebesar 54,4 gram/kapita/hari Konsumsi energi ini lebih rendah dari AKP tapi masih dalam mendekati normal, hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti gangguan pada supply food dan harga makanan yang meningkat dan tahun 2023 menjadi 57,5 gram/kapita/hari, dan Pada tahun 2024, konsumsi protein kembali menurun menjadi 57,00 gram/kap/hari, yang sama dengan standar nasional artinya pemenuhan protein pada pangan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan telah ideal dan beragam bergizi dan seimbang.

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu sepanjang waktu untuk dapat hidup sehat dan aktif beraktifitas, mencakup aspek ketersediaan, distribusi, keterjangkauan (fisik dan ekonomi) dan dimensi waktu.

Pada tataran rumah tangga, ketahanan pangan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan baik di Tingkat rumah tangga maupun wilayah dan daya beli. Daya beli rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan tergantung dari Tingkat pendapatan dan harga pangan. Tingkat pendapatan rumah tangga tergantung dari jumlah dan produktivitas tenaga kerja, jenis pekerjaan dan Tingkat upah.

Sementara ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga untuk menghasilkan dan membeli pangan yang dibutuhkan. Selain itu karena pengertian ketahanan pangan mencakup terpenuhinya kebutuhan pangan, maka pola atau Tingkat konsumsi penduduk merupakan faktor penentu tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa konsumsi energi dan konsumsi protein masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalami perubahan-perubahan pada beberapa tahun terakhir, tetapi masih dalam standar nasional.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21
Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	87	88,2	101,37

Sumber :Data SusenasBPS Tahun 2023

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin dengan indicator pencapaian skor PPH selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2021 s/d 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	87	82	82	87	80,4	86,9	88,9	88,2	92,41	105,97	108,41	101,37

Sumber :Data Susenas BPS Tahun 2024

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	88,2	87	108,41	Dengan semakin beragamnya konsumsi Masyarakat akan meningkatkan pencapaian skor PPH mendekati ideal.

Sumber :Data Susenas BPS Tahun 2024

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan Standar Provinsi dan Nasional, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Badan Pangan Nasional
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	88,2	90,5	94,1

Sumber :Data Susenas BPS Tahun 2024

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) dapat dilihat pada Tabel 3.25 dibawah ini

Tabel 3.25
Analisis Keberhasilan Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	Tanpa Satuan	87	88,2	108,41	Peningkatan skor PPH artinya peningkatan semakin beragamnya konsumsi pangan Masyarakat	gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk pemenuhan gizi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan aman (B2SA) yang akan meningkatkan pencapaian skor PPH mendekati ideal

Sumber :Data Susenas BPS Tahun 2024

Faktor keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 :

- a) Penganekaragaman pangan (diversifikasi pangan) melalui sosialisasi maupun penyuluhan bagi masyarakat untuk tidak bergantung pada satu sumber pangan memungkinkan masyarakat dapat menetapkan pangan pilihan sendiri.

- b) Pemberdayaan kaum perempuan melalui peningkatan pendidikan dan keterampilannya dalam pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
- c) Gerakan konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi pangan secara beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk dikonsumsi.

Hambatan yang dihadapi :

- a) Keterbatasan Sosialisasi Program peningkatan Pola Pangan Harapan belum merata diterima oleh masyarakat.
- b) Masih terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- c) Masih belum idealnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta belum berkembangnya industri pangan lokal.
- d) Pemanfaatan pangan lokal oleh Masyarakat Pesisir Selatan masih sebatas makanan pendamping belum bisa menjadi makanan pengganti beras dan terigu.
- e) Faktor ekonomi dan inflasi, Masyarakat miskin seringkali menghadapi kendala daya beli terhadap bahan pangan yang berkualitas.
- f) Distribusi pangan yang tidak merata, beberapa wilayah masih mengalami keterbatasan akses terhadap pangan berkualitas.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan :

- a) Meningkatkan promosi/kampanye pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman dalam melaksanakan edukasi/sosialisasi kepada masyarakat.
- b) Intervensi Kebijakan, telah dilakukan pemberian bantuan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan balita di daerah rawan pangan.
- c) Mempromosikan Hasil olahan pangan lokal yang ada di kelompok melalui event pameran atau pada acara kedinasan sebaiknya *menu/snack* yang disediakan adalah pangan lokal.

- d) Meningkatkan pengelolaan jaringan usaha pengolahan pangan lokal yang melibatkan *stakeholder* dan *off taker* terkait untuk memudahkan pelaku usaha pangan lokal dalam manajemen usaha, suplai bahan baku, promosi dan pemasaran maupun akses terhadap permodalan.
- e) Pengembangan Sumber Daya Manusia pelaku usaha pengolahan pangan lokal dalam bentuk Pelatihan maupun Bimbingan Teknis baik dalam bentuk pengolahan pangan lokal, manajemen usaha, kewirausahaan dan strategis bisnis pengolahan pangan lokal.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin dengan indikator kinerja *Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan*, diperlukan sumber daya yang memadai mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan
2. Sumber anggaran yang memadai.

Tabel 3.26
Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran Strategis 3

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan (6 orang Analis Ketahanan Pangan dan 20 orang Penalaah Teknis Kebijakan pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan)	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara jumlah (3 orang Analis Ketahanan Pangan dan 7 orang Penalaah Teknis Kebijakan pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan)	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal dicapai
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis,	Masih belum terpenuhinya anggaran untuk mencapai target yang ada seperti cadangan pangan yang harus disediakan, Bimbinagn Teknis Pengolahan Pangan Lokal, pelaksanaan Gerakan/Kampanye Pangan B2SA serta bantuan bibit/benih bermutu	Optimalisasi nggaran untuk capaian indikator kinerja dan program unggulan daerah

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan miskin dengan *Indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)* adalah sebesar Rp. 623.308.315,- dan terealisasi Rp. 552.729.854,- (88,68

%). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 11,32% dengan uraian tabel di bawah ini

Tabel 3.27
Dukungan Kegiatan APBD untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	Realisasi			Sisa Anggaran
			Keuangan	%	Fisik (%)	
B.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	560.793.415	498.994.504	88,98	100,00	61.798.911
7	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	299.999.860	276.097.554	92,03	100,00	23.902.306
	23 Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	299.999.860	276.097.554	92,03	100,00	23.902.306
8	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	235.000.005	197.138.650	83,89	100,00	37.861.355
	24 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	210.112.000	187.387.000	89,18	100,00	22.725.000
	25 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	24.888.005	9.751.650	39,18	100,00	15.136.355
9	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	25.793.550	25.758.300	99,86	100,00	35.250
	26 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	25.793.550	25.758.300	99,86	100,00	35.250
C	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	62.514.900	53.735.350	85,96	100,00	8.779.550
10	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	30.252.000	27.480.350	90,84	100,00	2.771.650
	27 Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	30.252.000	27.480.350	90,84	100,00	2.771.650
11	Kegiatan Penanganan Kerawan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.262.900	26.255.000	81,38	100,00	6.007.900
	28 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	32.262.900	26.255.000	81,38	100,00	6.007.900
	JUMLAH	623.308.315	552.729.854	88,68	100,00	8.779.550

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(623.308.315 \times 108,41\%) - 552.729.854}{(623.308.315 \times 108,41\%)} \times 100\% \\ &= 22,25\% \end{aligned}$$

Dari rumusan di atas diketahui efisiensi bahwa dalam penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah 22,25% dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Berdasarkan analisis terdapat keselarasan dalam pencapaian target pernyataan kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung pada sasaran 3. Dinas Perikanan dan Pangan pada tahun 2024 melaksanakan 2 program sebagai berikut :

Tabel 3.28
Program Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 3

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	560.793.415	498.994.504	88,98
2.	Penanganan Kerawanan Pangan	62.514.900	53.735.350	85,96
	Jumlah	623.308.315	552.729.854	88,68

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2023

Berikut Program yang mendukung capaian sasaran strategis 3 mencakup :

A. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Ketersediaan Pangan, sehingga cukup memenuhi kebutuhan pangan. Pagu Anggaran program ini sebesar Rp. 560.793.415,- dengan realisasi sebesar Rp. 498.994.504,- atau 88,98 %. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan.

I. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan,

a) Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Pokok Kabupaten/Kota. Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 299.999.860,- dengan realisasi sebesar Rp. 276.097.554,- atau 92.03 %, pada kegiatan ini ada Revitalisasi PPK sebanyak 2 unit yaitu :

- Kelompok Rawang Batu Gadang (II) di Kampung Koto Tengah Merapak, Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kecamatan Sutera
- Kelompok Syariak Dalam di Kampung Rawang, Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera

Revitalisasi Penggilingan Padi Kecil



Monitoring Revitalisasi Penggilingan Padi Kecil



II. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Pangan Kabupaten/Kota

kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

a) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan pengadaan cadangan pangan pemerintah berupa beras bekerjasama dengan Bulog, untuk tahun ini pengadaan beras adalah sebanyak 15 Ton. Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 210.112.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 187.387.000,- atau 89,18 %.

b) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa beras pada saat adanya kejadian bencana alam. Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 24.888.005,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.751.650,- atau 39,18 %.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah



Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah



III. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan.

a) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan pekarangan sehingga menghasilkan keanekaragaman Pangan sehingga dapat menambah pendapatan keluarga. Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 25.793.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.758.300,- atau 99,86 %, Pelaksanaan pada Sub kegiatan ini berupa :

1. Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam meningkatkan ketersediaan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal melalui pemanfaatan pekarangan rumah (KRPL).
2. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat dalam penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dan pengolahan serta konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

3. Melakukan promosi dan pengembangan kreasi dan inovasi tentang pengolahan pangan lokal dan pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) masyarakat.
4. Meningkatkan ketersediaan Penganekaragaman Pangan lokal melalui fasilitasi bantuan Pengembangan KRPL dana Hibah Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat.

Upaya yang dapat dilakukan adalah :

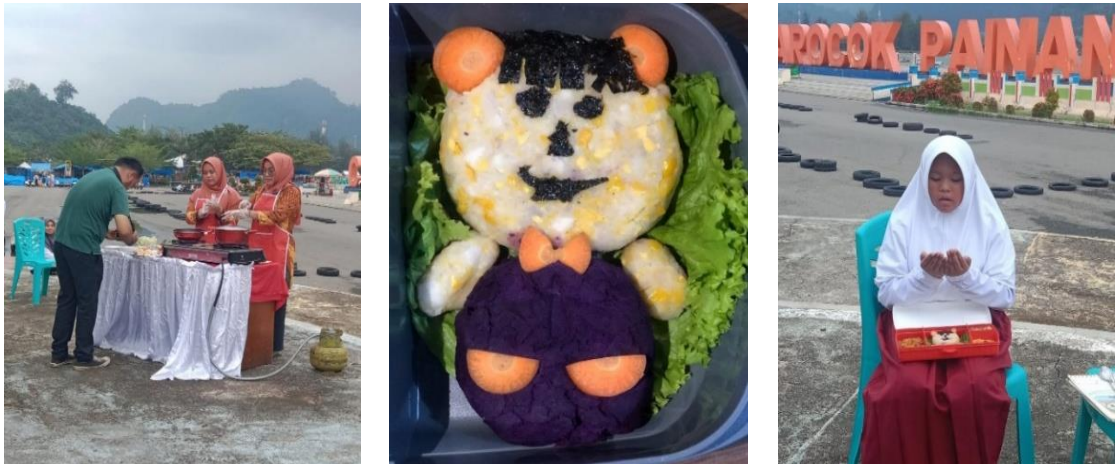
1. Sosialisasi dan Edukasi Gerakan Sadar Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk pencegahan dan Penurunan Stunting dan Demonstrasi Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) pada tanggal 24 Juni 2024 di Nagari Koto Baru Koto Barapak Kecamatan Bayang.
2. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan serta pendampingan kelompok wanita tani dalam Pemanfaatan Pekarangan berupa Bantuan Pengembangan KRPL Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat tahun 2024 pada 2 kelompok yaitu : KWT. Hamasah di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan dan KWT. Cahaya Gurami di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
3. Berpartisipasi dalam mengikuti lomba Pengolahan Pangan dan Lomba Pangan Got Talent tingkat anak Sekolah Dasar Tingkat Propinsi Sumatera Barat di Padang Panjang pada tanggal 20-21 Agustus 2024.

Sosialisasi dan Edukasi Gerakan Sadar Konsumsi Pangan B2SA Untuk Penurunan Stunting di Nagari Koto Baru Koto Barapak Kec. Bayang



Penyampaian materi dan pembinaan oleh ketua TP PKK Kab.Pesisir Selatan Ibu Yunesti Rusmayul Anwar kepada peserta

Persiapan mengikuti Lomba Pengolahan Pangan tingkat Prop. Sumbar

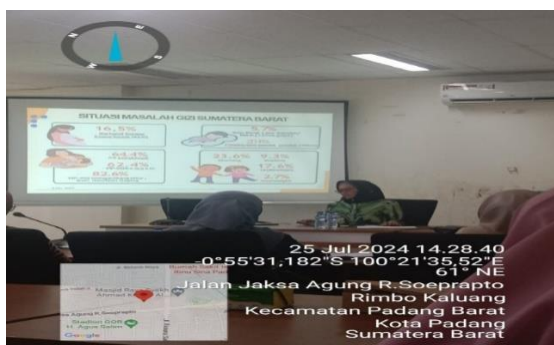


Mengikuti Lomba Pengolahan Pangan berbasis sumber daya lokal dan Lomba Pangan got talent Tingkat prop.sumbar tahun 2024 di padang panjang.



Acara diikuti oleh peserta dari TP PKK Nagari Painan Selatan
Ketua dan Pokja 3 TP PKK Kab.Pesisir Selatan.

Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Analisa Konsumsi Pangan dari data Susenas Pola Pangan Harapan (PPH) di Dinas Pangan Prop.Sumbar.



Menghadiri Bimtek Penyusunan Analisa Konsumsi Pola Pangan Harapan (PPH) Wilayah Sumatera I di Medan dan Mendampingi kelompok tani menghadiri Bimbingan Teknis dan sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan kegiatan Pengembangan KRPL tahun 2024 di Padang.



Pembinaan dan pendampingan kelompok wanita tani Hamasah di Nagari Kampuang Baru Korong nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan dan Melaksanakan verifikasi kelompok wanita tani Cahaya Gurami di Nagari Kambang Barat Kec. Lengayang.

B. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini bertujuan untuk menyediakan pangan bagi masyarakat miskin yg terkena rawan pangan transien sehingga menjamin pasokan pangan yang stabil. Pagu Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 62.514.900,- dengan Realisasi sebesar Rp. 53.735.350,- atau 85,96%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.

1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Kecamatan, kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan

a) Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Sub kegiatan ini bertujuan ketersediaan Informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif dan tertata dengan baik. Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 30.252.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 27.480.350,- atau 90,84 %, keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Peta Ketahanan Pangan (FSVA).

Rapat Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan



II. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota , terdiri dari 1 Sub Kegiatan

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak kerawanan pangan pada balita stunting dan ibu menyusui, Pagu Anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 32.262.900,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 26.255.000,- atau 81,38 %.

Dokumentasi Penyaluran bantuan penanganan daerah rawan pangan



Kerawana pangan dan gizi dilakukan dalam rangka pencapaian kedaulatan panga, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Amanat UU Pangan kepada pemerintah adalah membangaun, Menyusun dan mengembangkan system informasi pangan yang terintegrasi dengan system peringatan dini terhadap masalah pangan serta kerawanan pangan dan gizi.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis adalah:

1. penguatan system kewaspadaan pangan dan gizi.
2. penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan berdampak bencana
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan
4. Peningkatan aksesibilitas pangan bagi Masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit.
5. Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi.

Dalam mewujudkan misi 3, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran. Selanjutnya uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian sasaran strategis secara sistematis disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan

Pemanfaatan sumberdaya perikanan ke depan akan dikembangkan melalui berbagai industri perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan IPTEK, sumberdaya manusia yang berkualitas, kerja sama antar instansi/lembaga pemerintah lainnya, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Dengan potensi yang besar, perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan dengan pelaku usaha perikanan lainnya dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan.

Kegiatan perikanan tangkap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah melalui penyediaan peluang kerja. Keberhasilan sasaran strategis Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan ini diukur melalui 1 (satu) Indikator kinerja yaitu Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis 4 didukung oleh indikator kinerja produksi perikanan baik produksi budidaya maupun produksi tangkap, dengan capaian kinerja. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.29
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	50.694	60.942,68	120,22
Rata-rata Capaian					120,22

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indicator kinerja Jumlah Produksi Perikanan tahun 2024 melebihi target dengan capaian 120,22 % dengan prediksi sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan (Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap).

Formulasi Peningkatan Produksi Perikanan ini adalah :

$$\text{Produksi Perikanan} = \text{Jumlah Produksi Tahun } (n)$$

Capaian indikator Jumlah Produksi Perikanan ini diperoleh datanya dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya, yang dikelola oleh Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Pemberdayaan Nelayan. Produksi Perikanan pada tahun 2024 target sebesar 50.694 ton, dengan realisasi 60.942,68 ton (120,22 %).

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan
Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2022	2023	2024
1.	Jumlah Produksi Perikaan Budidaya	Ton	14.278	14.490	14.608
2.	Jumlah Produksi Perikaan Tangkap	Ton	35.907	58.404,99	46.334,68
	Jumlah		50.185	72.894,99	60.942,68

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Produksi Perikanan ini terdiri dari produksi perikanan Budidaya dan produksi perikanan tangkap. Dapat juga disimpulkan bahwa Capaian kinerja produksi perikanan budidaya terjadi peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 1,48 % dan pada tahun 2024 meningkat 0,82 % dari tahun 2023, begitu juga dengan produksi perikanan tangkap dari tahun 2023 terjadi peningkatan dari tahun 2022 sebesar 62,66 % (58.404,99 ton). Dan tahun 2024 turun 26 % (46.334,68 ton) namun masih tinggi dari target Renstra yaitu 36.086 ton.

Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap merupakan dampak dari upwelling yang terjadi di perairan laut. Dimana Upwelling (pembalikan massa air) adalah sebuah fenomena di mana air laut yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Fenomena ini membawa air dengan konsentrasi tinggi nutrisi seperti nitrat dan fosfat ke permukaan laut. Perairan yang kaya nutrisi ini menjadi pendorong bagi pertumbuhan plankton dan ganggang mikroskopis di perairan tersebut. Peningkatan biomassa ini berkontribusi terhadap tingginya hasil perikanan tangkap di kawasan tersebut.

Karena air dari kedalaman yang dibawa ke permukaan seringkali mengandung kandungan nutrisi yang tinggi, upwelling pada pesisir dapat membantu pertumbuhan rumput laut dan plankton. Selanjutnya, rumput laut dan plankton menjadi penyedia sumber makanan bagi ikan-ikan, mamalia laut, dan burung-burung di daerah tersebut. Dan itu telah terjadi 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2023 dan tahun 2024.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Jumlah Perikanan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.31
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2020 s/d 2024

Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	44.440	35.549	35.727	35.906	36.086	35.480	35.549	35.907	58.405	46.334,68	79,84	100	100,50	162,66	128,40
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	12.618	13.250	13.913	13.913	14.608	14.092	14.278	14.490	14.490	14.608	71,69	111,68	107,76	104,15	100,00
Jumlah	61.203	48.167	48.977	49.819	50.694	47.498	49.641	50.185	72.895	60.942,68	75,77	105,84	104,13	133,41	120,22

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Target produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 44.440 ton dan Realisasi sebesar 35.480 Ton atau dengan capaian 79,84 %, hal ini disebabkan terjadinya pandemic covid 19 yang mengakibatkan berkurangnya aktifitas nelayan dan daya beli masyarakat terhadap produk perikanan. Pada tahun 2021 realisasi produksi perikanan tangkap sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 35.549 ton atau dengan capaian 100 %. Sedangkan untuk tahun 2022 capaian produksi perikanan tangkap meningkat 100,50 % dari target yaitu 35.727 ton dengan realisasi 35.907 ton. Dan pada tahun 2023 kembali terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu 162,66 % dari target tahun 2023 sebesar 35.906 ton dengan realisasi sebesar 58.405 ton dan tahun 2024 produksi perikanan tangkap masih meningkat dari target 36.086 ton dengan realisasi 46.334,68 atau sebesar 128,40 % , dari hasil 2 tahun terakhir merupakan dampak dari fenomena upwelling yang membawa air dengan konsentrasi tinggi nutrisi seperti nitrat dan fosfat ke permukaan laut. Perairan yang kaya nutrisi ini menjadi pendorong bagi pertumbuhan plankton dan ganggang mikroskopis di perairan sehingga berkontribusi meningkatkan produksi perikanan tangkap

c. **Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Perbandingan capaian Indikator Jumlah Perikanan dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	60.942,68	50.694	120,22	kemajuan produksi perikanan telah melampaui target sebesar 20,22% lebih cepat dari yang direncanakan hingga 2026, capaian produksi perikanan sangat positif dan menunjukkan tren yang baik.

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Tingkat capaian terhadap target sebesar 120,22%, yang berarti realisasi produksi perikanan telah melampaui target yang ditetapkan untuk periode tersebut.
- 2) Indikator kinerja: Hasil ini menunjukkan bahwa sektor perikanan berkembang dengan baik dan melebihi ekspektasi dalam rencana strategis.
- 3) Capaian produksi perikanan sangat positif dan menunjukkan tren yang baik, jika tren ini berlanjut, target 2026 dapat direvisi untuk lebih ambisius atau fokus pada keberlanjutan produksi.
- 4) Tingkat kemajuan produksi perikanan dapat dihitung dengan formula:

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Kemajuan} &= \frac{\text{Capaian 2024} - \text{Target 2024}}{\text{Target 2024}} \times 100 \% \\
 &= \frac{60.942,68 - 50.694}{50.694} \times 100 \% \\
 &= 20,22 \%
 \end{aligned}$$

- 5) Artinya, kemajuan produksi perikanan telah melampaui target sebesar 20,22% lebih cepat dari yang direncanakan hingga 2026.

d. **Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi dan Nasional**

Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Perikanan dengan Standar Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran	Indikastor Kinerja	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
1.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	60.942,68	497.339,52	13.083.164

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

e. **Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indicator Jumlah Produksi Perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.34
Analisis Keberhasilan Kinerja Sasaran 4

No .	Sasaran	Indikator Kinerja	Satua	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	50.694	60.942,68	120,22	- Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup besar - Dukungan anggaran dalam kegiatan pembangunan perikanan di Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	- Pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan - pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pembinaan dan peningkatan SDM dalam penggunaan alat tangkap ikan

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Produksi perikanan tangkap tiap tahunnya fluktuatif dan tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya faktor cuaca dan iklim Beberapa hal tersebut di atas menjadi pertimbangan bahwa perlu dilakukan upaya strategis untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain dengan melakukan pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan (API) dan Alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang ramah lingkungan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada nelayan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pembinaan dan peningkatan SDM dalam penggunaan sarana alat tangkap dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) secara optimal dan berkelanjutan. Pembinaan yang dilakukan

mencakup bimbingan teknis, pemanfaatan teknologi penangkapan dan sarana penangkapan lainnya, sehingga pada akhirnya nelayan dapat memanfaatkan sarana penangkapan yang ada untuk meningkatkan hasil produksi/hasil tangkapan.

Pemberian bantuan sarana penangkapan (mesin, jaring, kapal jukung dan fish box) yang diberikan oleh pemerintah ikut memberi dampak terhadap persentase peningkatan produksi perikanan tangkap

Dalam 3 tahun terakhir jumlah bantuan sarana peningkatan yang diberikan sebagai berikut :

Tabel 3.35.
Bantuan Sarana Perikanan Tangkap Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Jenis Bantuan yang diberikan	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024
			DAK	APBD	DAK	APBD	APBD
1	Jaring	Pcs	65	564	1220	57	63
2	Mesin Tempel 15 PK	Unit	10	56	24	26	75
3	Mesin Tempel 40 PK	Unit	-	20	-	20	34
4	Mesin Long Tail	Unit	-	25	-	13	24
5	Fish Box	Unit	-	-	-	-	13
6	GPS	Unit	-	-	-	3	-
7	Perahu Fiber	Paket	7	-	14	-	-
	Jumlah		76	665	1258	119	209

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Dari bantuan yang diberikan kepada nelayan memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap. Dengan bantuan mesin dan perahu fiber jarak tempuh nelayan dalam menangkap ikan lebih jauh, dan dengan bantuan jaring yang baru dan GPS, nelayan lebih mudah melakukan penangkapan ikan, serta fish Box memudahkan nelayan untuk menyimpak hasil tangkapannya. Hal ini dapat dilihat hasil produuksi pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.36
Data Produksi Perikanan Tangkap Per Jenis Ikan Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Jenis Data	Satuan	TOTAL S 1	TOTAL S 2	TOTAL 2024
	Ikan Laut				
1	Alu-alu Sirip Hitam; Barakuda Sirip Hitam (<i>Sphyræna tiburo</i>)	Ton	219,59	194,20	413,78
2	Bawal Hitam (<i>Parastromateus niger</i>)	Ton	34,04	28,04	62,08
3	Belanak (<i>Chelonia mydas</i>)	Ton	92,94	79,57	172,52
4	Cakalang (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	Ton	3.173,66	3.049,51	6.223,17
5	Cumi-cumi (<i>Loligo chinensis</i>)	Ton	122,52	159,15	281,67

No	Jenis Data	Satuan	TOTAL S 1	TOTAL S 2	TOTAL 2024
6	Gerot-gerot (<i>Pomadasys andamanensis</i>)	Ton	140,39	120,90	261,29
7	Gulamah (<i>Gymnocranius griseus</i>)	Ton	34,54	28,65	63,19
8	Kakap Merah (<i>Lutjanus bitaeniatus</i>)	Ton	181,23	184,55	365,78
9	Kembung (<i>Rastrelliger faughni</i>)	Ton	3.479,59	3.064,92	6.544,51
10	Kerapu Karang (<i>Cephalopholis boenack</i>)	Ton	226,78	191,13	417,90
11	Kuniran; Biji Nangka (<i>Parupeneus cyclostomus</i>)	Ton	584,52	592,30	1.176,82
12	Kurisi (<i>Pentapodus setosus</i>)	Ton	329,66	267,80	597,46
13	Kuro; Senangin (<i>Eleutheronema tetradactylum</i>)	Ton	663,53	593,59	1.257,12
14	Kuwe (<i>Carangoides armatus</i>)	Ton	1.357,04	1.205,56	2.562,59
15	Layang (<i>Decapterus maruadsi</i>)	Ton	431,49	362,57	794,06
16	Layur (<i>Trichiurus lepturus</i>)	Ton	485,12	437,75	922,87
17	Lemadang (<i>Coryphaena hippurus</i>)	Ton	182,23	185,51	367,75
18	Lidah (<i>Cynoglossus arel</i>)	Ton	77,17	66,01	143,18
19	Manyung Besar (<i>Arius thalassinus</i>)	Ton	400,62	332,50	733,12
20	Pari Babi (<i>Taeniura meyeni</i>)	Ton	15,35	14,17	29,52
21	Peperek Bondolan (<i>Leiognathus bindus</i>)	Ton	658,85	537,22	1.196,08
22	Selar Kuning (<i>Selaroides leptolepis</i>)	Ton	209,12	191,59	400,71
23	Sotong (<i>Pharaoh cuttlefish</i>)	Ton	119,37	119,37	238,74
24	Swanggi (<i>Priacanthus hamrur</i>)	Ton	452,70	350,13	802,83
25	Tembang (<i>Sardinella gibbosa</i>)	Ton	460,70	362,65	823,35
26	Tenggiri (<i>Scomberomorus commerson</i>)	Ton	490,11	467,46	957,57
27	Teri Indian (<i>Stolephorus indicus</i>)	Ton	3.795,68	3.535,88	7.331,55
28	Tetengkek (<i>Megalaspis cordyla</i>)	Ton	156,26	149,74	306,00
29	Tongkol (<i>Auxis thazard</i>)	Ton	5.088,39	5.183,36	10.271,76
30	Tuna Sirip Kuning; Madidihang (<i>Thunnus albacares</i>)	Ton	133,91	124,31	258,22
31	Udang Jerbung (<i>Penaeus merguensis</i>)	Ton	54,94	45,72	100,66
32	Udang Windu (<i>Panaeaus monodon</i>)	Ton	134,31	122,55	256,86
	Ikan Darat (PUD)				
33	Belut Sawah; Remang Sawah (<i>Strophidon sathete</i>)	Ton	11,61	11,56	23,17
34	Betok (<i>Anabas testudineus</i>)	Ton	10,07	9,78	19,84
35	Gabus (<i>Channa striata</i>)	Ton	8,61	8,38	16,99
36	Gurame; Gurami (<i>Osphronemus goramy</i>)	Ton	0,56	0,54	1,10
37	Lele (<i>Clarias batrachus</i>)	Ton	5,66	5,53	11,19
38	Mujair (<i>Oreochromis mossambicus</i>)	Ton	1,00	0,96	1,96
39	Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)	Ton	1,02	0,99	2,01
40	Nilem (<i>Osteochilus vittatus</i>)	Ton	1,26	1,21	2,47
41	Sepat Siam (<i>Trichogaster pectoralis</i>)	Ton	1,65	1,58	3,23
42	Sidat (<i>Anguilla anguilla</i>)	Ton	7,71	7,60	15,31
43	Tawes (<i>Barbodes gonionotus</i>)	Ton	1,43	1,39	2,82
44	Udang Putih; Udang Api-api (<i>Metapenaeus eboraensis</i>)	Ton	2,80	2,73	5,54
	TOTAL	Ton	24.039,73	22.400,56	46.440,29

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 60.942,68 ton dengan tingkat capaian 120,22 %. Capaian indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap, Sangat Tinggi, hal ini adalah karena berbagai **upaya** yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten pesisir Selatan antara lain:

1. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan memberikan bantuan sarana penangkapan berupa mesin (mesin tempel, mesin diesel, mesin longtail), jaring, Fish Box, alat tangkap kepiting dan Rumpon laut dangkal.
2. Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan bagi Nelayan
3. Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan keahlian melalui kegiatan;
 - a. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan
 - b. Sosialisasi Asuransi Nelayan/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nelayan
4. Terlaksananya pemberian asuransi nelayan bagi nelayan tradisional dan nelayan skala kecil skala kecil.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi perikanan tangkap :

Faktor Keberhasilan Capaian Sasaran Strategis

1. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup besar.
2. Dukungan anggaran dalam kegiatan pembangunan perikanan di Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Peran serta Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Koperasi perikanan yang telah terbentuk yang partisipasi aktif dalam pembangunan perikanan.

Hambatan yang masih ditemui dalam Upaya peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap adalah :

1. Faktor Cuaca dan iklim yang tidak menentu.
2. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga terjadi overfishing di perairan umum.
3. Sarana dan prasarana penangkapan masih kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya
4. Pangkalan Pendaratan Ikan belum tersedia secara representative

5. Kurangnya permodalan nelayan untuk pengembangan penangkapan ikan
6. Teknologi penangkapan ikan yang dilakukan masih relative sederhana dan pelestarian sumberdaya perikanan di perairan umum maupun lahan pesisir masih belum optimal.
7. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap

Upaya ke depan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pencapaian sasaran strategis jumlah produksi perikanan antara lain :

1. Peningkatan sarana perikanan tangkap yang memadai terutama berupa kapal motor karena dapat memperluas jangkauan nelayan untuk menangkap ikan dibandingkan perahu
2. Peningkatan modernisasi alat tangkap ikan yang berwawasan lingkungan guna peningkatan produksi perikanan tangkap
3. Kualitas SDM perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai perikanan laut tangkap untuk para nelayan.

Produksi perikanan Budidaya tahun 2024 di dominasi oleh beberapa jenis ikan yaitu Lele, Nila, Gurame, Udang Vaname, Ikam Mas dan Kerapu dan lain-lain. Dalam 3 tahun terakhir jumlah bantuan sarana peningkatan yang diberikan sebagai berikut

Tabel 3.37
Bantuan Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya Tahun 2022, 2023, 2024

NO	JENIS BANTUAN YANG DIBERIKAN	Satuan	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan rasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan Lele	Unit	1	-	-
2	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan Hias	Unit	1	-	-
3	Bantuan Benih dan Pakan Ikan Lele	Paket	3	3	1
4	Bantuan Benih dan Pakan Ikan Nila	Paket	4	3	
5	Bantuan Benih dan Pakan Ikan Gurame	Paket	1	12	1
6	Pembuatan Kolam	Unit	-	-	1
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan (Pembuatan Kolam, Benih dan Pakan)	Unit	1	-	-
8	Pengadaan Calon Induk dan Prasarana Pembenihan Ikan Lele	Paket	1	-	-
9	Pengadaan Calon Induk dan Prasarana Pembenihan Ikan Hias	Paket	1	-	-
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri	Paket	2	-	-
Total			15	18	3

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Dari bantuan yang diberikan kepada pembudidaya ikan memberikan dampak positif meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya. Dengan demikian dapat

meningkatkan pendapatan pembudidaya. Peningkatan produksi perikanan budidaya perjenis ikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.38
Data Produksi Perikanan Budidaya Per Jenis Ikan Dinas Perikanan dan Pangan
Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Jenis Data	Satuan	TOTAL S 1	TOTAL S 2	TOTAL 2024
1	Ikan Mas	Ton	351,870	347,300	699,170
2	Nila	Ton	2.584,680	2.081,900	4.666,580
3	Gurame	Ton	1.539,000	1.441,200	2.980,200
4	Lele	Ton	2.502,400	2.336,200	4.838,600
5	Kerapu	Ton	20,710	14,780	35,490
6	Udang Vaname	Ton	371,400	762,300	1.133,700
	Total		7.370,06	6.983,680	14.353,740

* Estimasi Produksi

Tabel 3.39 PRODUKSI BENIH IKAN

BBI PINCURAN BOGA

Januari sd Desember 2024

No	Tanggal	Tujuan	Nama	Jenis	Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (ekor)			Jumlah Benih	Jumlah PAD (Rp)	Jumlah Bantuan (Rp)	JUMLAH	Ket.
							Lele	Nila	Gurami					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02/01/2024	IV Jurai	Herwindi	Benih	3-5 cm	160		1.000		1.000		160.000	160.000	Bantuan
2	18/01/2024	Inderapura	Suwanto	Benih	3-5 cm	160		2.000		2.000		320.000	320.000	Bantuan
3	02/02/2024	Inderapura	Sandra Cahnia	Benih	3-5 cm	160		5.000		5.000		800.000	800.000	Bantuan
4	06/02/2024	Sutera	Suci Bulandari	Benih	3-5 cm	160		5.000		5.000		800.000	800.000	Bantuan
5	12/02/2024	Kodim 133	Serda Ali Mardoni	Benih	3-5 cm	160		5.000		5.000		800.000	800.000	Bantuan
6	28/02/2024	IV Jurai	M Husni	Benih	3-5 cm	160		5.000		5.000		800.000	800.000	Bantuan
7	21/03/2024	Batang Kapas	Iju	Benih	8 - 12 cm	500	2.500			2.500		1.250.000	1.250.000	Bantuan
8	22/03/2024	Bayang	Indah	Benih	8 - 12 cm	500	2.000			2.000		1.000.000	1.000.000	Bantuan
9	23/03/2024	Tarusan	Monic	Benih	8 - 12 cm	500	1.000			1.000		500.000	500.000	Bantuan
10	22/04/2024	Bayang	Desi	Benih	8 - 12 cm	500	2.500			2.500		1.250.000	1.250.000	Bantuan
11	22/04/2024	IV Jurai	Buya Suhendri	Benih	8 - 12 cm	500	2.500			2.500		1.250.000	1.250.000	Bantuan
12	23/04/2024	IV Jurai	Pinto	Benih	8 - 13 cm	500	1.000			1.000		500.000	500.000	Bantuan
13	28/05/2024	IV Jurai	Rifa	Benih	3-5 cm	160	5.000			5.000		800.000	800.000	Bantuan
14	20/06/2024	Bayang	Adam	Benih	3 - 5 cm	160	3.000			3.000		480.000	480.000	Bantuan
15	5 Juli	Lengayang	Epi	Benih	3-5 cm	160	10.000			10.000		1.600.000	1.600.000	Bantuan
15	5 Juli	Lengayang	Epi	Benih	3-5 cm	160	10.000			10.000		1.600.000	1.600.000	Bantuan
16	08/08/2024	Pancung Soal	Jon	Benih	3-5 cm	160	5.000			5.000		800.000	800.000	Bantuan
17	12/08/2024	Linggo Sari Baganti	Mardison (Pokdakan lagan Sepakat)	Benih	3-5 cm	160	17.500			17.500		2.800.000	2.800.000	Bantuan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	27/09/2024	Salido Kec. IV Jurai	Saiful Ikhlas	Benih	2-3 cm	100	5.000			5.000		500.000	500.000	Bantuan
18	30/09/2024	Nagari Gunuang Bungkuak Lumpo Kec. IV Jurai	Nagari Gunuang Bungkuak Lumpo	Benih	2-3 cm	100	6.500			6.500		650.000	650.000	Bantuan
19	28/10/2024	Dani	Tapan	Benih	2-4 cm	100	10.000			10.000		1.000.000	1.000.000	Bantuan
20	18/11/2024	Polres	Painan		3-5 cm	160	10.000			10.000		1.600.000	1.600.000	Bantuan
21	Retribusi		Retribusi	Benih	3-5 cm	160	5.000			5.000	800.000		800.000	PAD
				Benih	2-3 cm	100	27.000			27.000	2.700.000		2.700.000	PAD
TOTAL							115.500	23.000	-	138.500	3.500.000	19.660.000	23.160.000	-

Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga milik Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang tahun 2024 melakukan pembibitan Ikan Nila dan Ikan Lele, yang menghasilkan sebanyak 138.500 benih. Dari semua benih tersebut sebagian besar diberikan ke kelompok pembudidaya ikan yaitu sebanyak 115.500 benih dan 23.000 benih dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Capaian produksi Perikanan Budidaya dapat dilihat bahwa target produksi perikanan Budidaya pada tahun 2021 sebesar 12.618 ton dan realisasi sebesar 14.092 Ton atau dengan capaian 111,68 %. Pada tahun 2022 target produksi perikanan Budidaya yaitu 13.913, realisasi sebesar 14.278 ton atau dengan capaian 107,76 %. Sedangkan untuk tahun 2023 target produksi perikanan Budidaya sebesar 13.913 ton dengan realisasi 14.490 ton. Dan pada tahun 2024 target perikanan Budidaya 14.608 ton dengan realisasi sebesar 14.759,14 ton dengan capaian sebesar 101,04 ton

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi perikanan budidaya :

Hambatan yang dihadapi dari capaian sasaran strategis

1. Ketersediaan benih dan induk unggul masih terbatas.
2. Sarana dan prasarana pembudidayaan ikan masih kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya
3. Kurangnya permodalan pembudidaya untuk pengembangan budidaya ikan
4. Masih rendahnya SDM Masyarakat Pembudidaya
5. rendahnya kesadaran pembudidaya terhadap pengelolaan kualitas air sehingga terjadi penyebaran hama penyakit ikan
6. Masih sulitnya pemasaran membuat pembudidaya kurang berkembang karena masih bersifat lokal.
7. Faktor cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang tahun 2024, yang menyebabkan banjir. Hal ini berpengaruh terhadap usaha budidaya ikan. Diantaranya hanyutnya ikan dan udang yang dibudidayakan di kolam maupun tambak udang.
8. Pemanfaatan lahan budidaya secara maksimal, seperti budidaya KJA di laut, budidaya tambak, budidaya air tawar dan budidaya secara intensif

Upaya yang dilakukan

1. Memberikan bantuan induk unggul yang bersertifikat dan bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Pembudidaya ikan
2. Pembinaan dan penerapan proses cara budidaya dan cara pembenihan ikan yang baik dengan melakukan sosialisasi CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang baik) bagi unit usaha perikanan budidaya.
3. Sosialisasi Perizinan terhadap pembudidaya ikan terutama kepada pelaku usaha tambak udang untuk dapat melakukan pengurusan izin usaha dan tanda daftar usaha
4. Pengendalian produksi perikanan budidaya melalui monitoring hama dan penyakit ikan,temu tekans hama dan penyakit ikan

5. Memperbaiki kualitas induk sehingga mutu benih yang dihasilkan berkualitas sehingga produksi bisa meningkat, pendapatan pembudidaya juga meningkat
6. Pendampingan oleh tenaga pendamping Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) agar pembudidaya bisa mendapatkan pinjaman modal
7. Peningkatan SDM dan keahlian pembudidaya baik dari sisi manajerial maupun teknik produksi dalam pengelolaan usaha budidaya, sehingga pemanfaatan lahan budidaya bisa lebih optimal. Salah satu upaya adalah dengan melakukan pelatihan maupun penyuluhan

Untuk mempertahankan keberhasilan ini dan mengatasi tantangan di masa depan, diperlukan upaya optimalisasi teknologi, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya PDRB Sektor unggulan dengan indikator kinerja jumlah produksi perikanan, perlunya sumberd daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap.
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 3.40
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 4

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap	Masih terdapat beberapa kekurangan jumlah SDM yang mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pencapaian sasaran strategis bisa optimal

Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Penggunaan anggaran yang ada di maksimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Mendorong investor untuk berinvestasi pada kapal motor dengan ukuran skala besar sehingga nelayan dapat menjangkau wilayah laut lepas	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program
Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai dalam mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tepat guna

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 202 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan tangkap adalah sebesar Rp. 4.949.404.281,- dan terealisasi Rp. 4.772.914.968,- (96,43%). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 3,57 dengan uraian tabel di bawah ini:

Tabel 3.41
Dukungan Kegiatan APBD untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 4

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	Realisasi			Sisa Anggaran
			Keuangan	%	Fisik (%)	
D	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.575.288.307	4.403.263.143	96,24	100,00	172.025.164
12	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.989.949	7.699.660	96,37	100,00	290.289
	29 Sub Kegiatan Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan	7.989.949	7.699.660	96,37	100,00	290.289
13	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.567.298.358	4.395.563.483	96,24	100,00	171.734.875
	30 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	4.560.026.358	4.389.478.883	96,26	100,00	170.547.475
	31 Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	7.272.000	6.084.600	83,67	100,00	1.187.400
E	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	374.115.974	369.651.825	98,81	100,00	4.464.149
14	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	250.073.350	247.303.000	98,89	100,00	2.770.350
	32 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	250.073.350	247.303.000	98,89	100,00	2.770.350
15	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	124.042.624	122.348.825	98,63	100,00	1.693.799
	33 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	124.042.624	122.348.825	98,63	100,00	1.693.799
	JUMLAH	4.949.404.281	4.772.914.968	96,43	100,00	176.489.313

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(4.949.404.281 \times 120,22\%) - 4.772.914.968}{(4.949.404.281 \times 120,22\%)} \times 100\% \\ &= 19,78\% \end{aligned}$$

Dari rumusan di atas diketahui efisiensi bahwa dalam penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah 19,78% dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada

- g. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**
Berdasarkan analisis terdapat keselarasan dalam pencapaian target pernyataan kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung pada sasaran 4. Dinas Perikanan dan Pangan pada tahun 2024 melaksanakan 2 program sebagai berikut :

Tabel 3.42
Program Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 4

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.575.288.307	4.403.263.143	96,24
2.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	374.115.974	369.651.825	98,81
	Jumlah	4.949.404.281	4.772.914.968	96,43

Capaian Sasaran strategis 4 didukung oleh Beberapa Program yaitu:

A. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan ini bertujuan untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Skala Kecil Perikanan ini juga penentu dalam peningkatan Produksi Perikanan sebab tanpa didukung oleh sarana prasarna yang cukup maka dapat mempengaruhi Produksi Perikanan. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.731.273.922,- dengan realisasi Rp. 5.236.185.649,- dan didukung 2 (dua) Sub kegiatan berikut ini:

1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.

Sub Kegiatan ini bertujuan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang bersumber dari Dana APBD/APBD-P Pagu anggaran sub Kegiatan ini sebesar Rp. 4.560.026.358- (*Empat milyar lima ratus enam puluh juta dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*).- terealisasi belanja sebesar Rp. 4.389.478.883.- (*Empat milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah*).- atau terealisasi 96,25 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik kegiatan 100% , rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD)

- 1) Pengadaan Mesin Tempel 15 PK (APBD) 72 unit
- 2) Pengadaan Mesin Tempel 40 PK (APBD) 34 unit
- 3) Pengadaan Mesin Long Tail 6,5 PK (APBD) 24 unit
- 4) Pengadaan Jaring Trammel Net (APBD) 63 piece
- 5) Pengadaan Cool Box (APBD) sebanyak 13 unit

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)

1. Pengadaan Mesin Tempel 15 PK (APBD-P) 3 unit

SOSIALISASI PENINGKATAN KAPASITAS NELAYAN KECIL

Dalam Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2024 ini juga dilaksanakan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil Kabupaten Pesisir Selatan. Pelatihan dilaksanakan 1 (satu) hari pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 di Hotel Triza Painan Jl. Dr. Hamka - Painan.

Narasumber pada pelatihan tersebut adalah :

1. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Painan
3. Petugas Kesyahbandaran Kantor KSOP Kelas II Teluk Bayur
4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Pangan Provinsi Sumatera Barat.

Peserta pada pelatihan tersebut berjumlah 75 orang nelayan yang merupakan nelayan penerima Hibah / Bantuan baik dari APBD Kabupaten Pesisir Sealatan

maupun dari APBD Provinsi Sumatera Barat dalam Tahun Anggaran 2024. Peserta tersebut terdiri dari :

1. Kecamatan Koto XI Tarusan : 6 orang
 2. Kecamatan Bayang : 4 orang
 3. Kecamatan IV Jurai : 6 orang
 4. Kecamatan Batang Kapas : 6 orang
 5. Kecamatan Sutera : 2 orang
 6. Kecamatan Lengayang : 9 orang
 7. Kecamatan Ranah Pesisir : 4 orang
 8. Kecamatan Linggo Sari Baganti : 10 orang
 9. Kecamatan Airpura : 2 orang
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

Dari pagu anggaran Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Kelembagaan Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.272.000,- (*Tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).- terealisasi belanja sebesar Rp. 6.084.600,- (*Enam juta delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah*).- atau terealisasi 83,67 % dari pagu anggaran namun demikian fisik kegiatan terlaksana 100%, dengan rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Bantuan atau hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat yang telah difasilitasi kegiatan ini adalah :

- 1) Bantuan Alat Penangkapan Ikan (API) Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa Gillnet Monofilamen 2 inci Ø 0,25 : 172 piece
- 2) Bantuan Mesin Tempel 15 PK Kementerian Kelautan dan Perikanan : 20 unit
- 3) Bantuan Penataan Kampung Nelayan Maju (KALAJU) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diserahkan kepada :

POKMAS PERMATA PULAU PUTI	Kampung	: Air Ubah	Rp. 600.000.000.-
	Nagari	: Pulau Rajo Indrapura	
	Kecamatan	: Airpura	

Penataan yang dilaksanakan di lokasi KALAJU adalah :

- Pembangunan Balai Pertemuan Nelayan

- Pembangunan Jembatan
 - Pembangunan Jalan
 - Pembangunan Gapura
 - Pengadaan Penerangan Jalan Umum
- 4) Bantuan Mesin Long Tail dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebanyak : 14 Unit
 - 5) Bantuan Fish Box dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berupa :
 - Fish box 200 liter : 50 unit
 - Fish box 100 liter : 100 unit
 - 6) Bantuan Alat Penangkapan Ikan Gillnet Monofilamen dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat : 100 piece

Penyerahan Hibah / Bantuan Anggaran Apbd Ta 2024

1. Penyerahan Hibah Apbd Ta 2024 Oleh Bapak Bupati Pesisir Selatan Untuk Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti Dan Kecamatan Airpura Berlokasi Di Posko Koperasi Nelayan Beringin Sakti Kampung Sumedang Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir



2. Penyerahan Hibah Apbd Ta 2024 Oleh Bapak Bupati Pesisir Selatan Untuk Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera Dan Kecamatan Lengayang Berlokasi Di Lapangan Volly Ball Merah Putih Hambalang Ujung Air Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera



3. Penyerahan Hibah Apbd Ta 2024 Oleh Bapak Bupati Pesisir Selatan Untuk Kecamatan Iv Jurai, Kecamatan Bayang Dan Kecamatan Koto Xi Tarusan Berlokasi Di Kantor Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulai Kecamatan Koto Xi Tarusan



4. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil Anggaran Apbd Ta 2024



5. Monitoring Pekerjaan Kampung Nelayan Maju



6. Penyerahan Bantuan Bpjs Ketenagakerjaan Untuk Nelayan Melalui Apbd Provinsi Sumatera Barat Ta 2024



B. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya baik diperairan umum atau kolam, Pagu anggaran sebesar Rp. 374.115.974,- dengan realisasi anggaran Rp. 369.651.825.- yang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

I. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi perikanan budidaya, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan.

1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan. Sub Kegiatan ini bersumber dari Dana APBD, yang bertujuan Meningkatkan Produksi Perikanan, Pendapatan dan Kesejahteraan Kelompok Pembudidaya, Pagu Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 250.073.350,- dengan realisasi anggaran Rp. 247.303.000.- atau 98.89 %.

Pelaksanaan kegiatan ini dengan rincian :

- ✓ Pengadaan Benih Ikan Gurame dan Pakan 1 paket : Pokdakan Solok Jambak Saiyo Kec. IV Jurai
 - Benih : 18.000 ekor
 - Pakan 781 : 28 karung
 - Pakan 781-2 : 45 karung
- ✓ Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan 1 paket : Pokdakan Bina Tani Nusantara Kec. Lengayang
 - Benih : 20.000 ekor
 - Pakan Benih PF 1000 : 3 karung
 - Pakan 781 : 15 karung
 - Pakan 781-2 : 20 karung
 - Pakan 781 - 3 : 40 karung
- ✓ Pembuatan Kolam Pokdakanan Bina Tani Nusantara 1 paket : Pokdakan Bina Tani Nusantara Kec. Lengayang
 - 3 buah kolam 3 x 6 m

1. Pengadaan Benih Ikan Gurame dan Pakan



2. Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan





3. Pembuatan Kolam Pokdakanan Bina Tani Nusantara



II. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan Budidaya , yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan .

1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang bertujuan Meningkatkan Produksi Perikanan, Pendapatan dan Kesejahteraan Kelompok Pembudidaya, Pagu Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 124.042.624,- dengan realisasi anggaran Rp. 122.348.825.- atau 98.63 %. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung operasional Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga dan pembinaan ke kelompok budidaya.

Kegiatan yang dilakukan di BBI Pincuran Boga yaitu melaksanakan kegiatan pembenihan mulai dari pemeliharaan induk, pemijahan, penetasan telur, pendederan dan panen benih untuk di jual. Selain untuk dijual ada juga yang didistribusikan untuk bantuan – bantuan berdasarkan proposal yang masuk ke Dinas Perikanan dan Pangan.

- a) Bantuan yang diserahkan ke masyarakat Bantuan Benih Ikan Nila sebanyak 79.950 ekor yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b) Penjualan Benih Ikan Nila sebanyak 12.375 ekor sebagai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 5.445.000,-.

Dokumentasi Bantuan Benih Ikan Lele Untuk Pokdakan Lagan Sepakat Dalam Rangka Mendukung Tmmd Ke 121 Tahun 2024



Bantuan Untuk Polres Pesisir Selatan



Strategi Jangka Panjang untuk Keberlanjutan dan Pertumbuhan Sektor Perikanan

Agar keberhasilan dalam produksi perikanan tetap berlanjut dan tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang, diperlukan strategi yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, teknologi, dan sosial. Berikut adalah strategi jangka panjang yang dapat diterapkan:

1. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan

A. Penerapan Sistem Kuota dan Zonasi Perikanan

- Menetapkan kuota tangkapan ikan berdasarkan analisis stok ikan untuk mencegah overfishing.

- Menerapkan zona konservasi di wilayah-wilayah perairan tertentu untuk pemulihan ekosistem laut.
- Membangun sistem pengawasan perikanan berbasis satelit untuk mencegah penangkapan ilegal (IUU Fishing).

B. Penguatan Budidaya Perikanan Berkelanjutan

- Mengembangkan perikanan budidaya berbasis ekologi untuk mengurangi ketergantungan pada perikanan tangkap.
- Mendorong penerapan teknologi bioflok dan aquaponik agar produksi lebih efisien dan ramah lingkungan.
- Menyediakan insentif bagi pembudidaya ikan yang menerapkan praktik ramah lingkungan

2. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi

A. Modernisasi Teknologi Perikanan

- Meningkatkan penggunaan sistem informasi perikanan berbasis AI dan IoT untuk membantu nelayan menentukan daerah tangkapan potensial.
- Mengembangkan kapal perikanan bertenaga listrik atau hybrid untuk mengurangi konsumsi BBM dan emisi karbon.

B. Pembangunan Infrastruktur Rantai Pasok

- Memperluas cold storage dan pelabuhan perikanan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
- Mengembangkan fasilitas pengolahan ikan terintegrasi agar produk perikanan memiliki nilai tambah lebih tinggi.
- Meningkatkan jaringan distribusi ke daerah-daerah potensial untuk memperluas pasar.

3. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

A. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

- Memberikan subsidi BBM dan alat tangkap ramah lingkungan untuk meningkatkan daya saing nelayan kecil.

- Mendorong pembentukan koperasi nelayan agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih baik di pasar.
- Menyediakan asuransi dan jaminan sosial bagi nelayan dan pekerja sektor perikanan.

B. Pelatihan dan Pendidikan Perikanan

- Mengadakan program pelatihan teknis tentang budidaya, pengolahan ikan, dan pemasaran digital.
- Mengembangkan kurikulum pendidikan perikanan berbasis teknologi dan inovasi untuk generasi muda.
- Mendorong kolaborasi dengan universitas dan lembaga riset untuk meningkatkan inovasi di sektor perikanan.

4. Ekspansi Pasar dan Diversifikasi Produk Perikanan

A. Penguatan Ekspor dan Standarisasi Produk

- Meningkatkan standar kualitas dan keamanan pangan agar produk perikanan dapat bersaing di pasar global.
- Memperluas akses pasar ekspor ke negara-negara dengan permintaan tinggi seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat.

B. Pengembangan Produk Olahan Berdaya Saing

- Mendorong industri pengolahan ikan untuk menciptakan produk inovatif seperti nugget ikan, abon ikan, dan suplemen berbasis ikan.
- Mengembangkan branding dan promosi digital untuk meningkatkan daya tarik produk perikanan di pasar domestik maupun internasional.

C. Optimalisasi Pemanfaatan E-commerce dan Digital Marketing

- Mendorong nelayan dan pembudidaya ikan untuk memanfaatkan platform e-commerce dalam penjualan hasil perikanan.
- Membantu UMKM sektor perikanan dalam pemasaran digital agar produk mereka lebih dikenal.

Keberhasilan capaian produksi perikanan ini menunjukkan bahwa sektor perikanan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Namun, tantangan keberlanjutan tetap harus diantisipasi agar pertumbuhan ini tidak hanya sementara.

Solusi yang perlu dilakukan meliputi pengelolaan perikanan berkelanjutan, peningkatan infrastruktur, pemberdayaan nelayan, serta ekspansi pasar. Dengan pendekatan yang komprehensif, produksi perikanan dapat terus meningkat tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya.

Dengan strategi jangka panjang yang mencakup pengelolaan berkelanjutan, peningkatan teknologi, pemberdayaan nelayan, serta ekspansi pasar, sektor perikanan dapat terus berkembang tanpa mengorbankan ekosistem laut.

Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri perikanan secara berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja ditentukan oleh kebutuhan anggaran sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan tahun 2024. Semakin tinggi capaian kinerja yang diharapkan, semakin besar kebutuhan anggaran. Dari 6 (enam) program dan 16 (tiga belas) kegiatan dengan 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang telah ditetapkan melalui APBD tahun 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) telah dialokasikan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar sebesar **Rp. 11.072.645.124,-** (Sebelas milyar tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.43
Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Pangan

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran	% Sisa Anggaran
1.	Belanja Operasional	11.047.609.074	10.415.178.315	94,28	632.430.759	5,72
2.	Belanja Modal	25.036.050	22.800.000	91,07	2.236.050	8,93
	Jumlah	11.072.645.124	10.437.978.315	94,27	634.666.809	5,73

Sumber :Laporan Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 11.072.645.124,-** (Sebelas milyar tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah) terealisasi sebesar **Rp. 10.437.978.315,-** (Sepuluh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau sebesar **94,27%**, dengan efisiensi anggaran sebesar **5,73 %**, seperti tercantum pada tabel 3.37.

Tabel 3.44
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang
Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Program	Belanja		
							Anggaran Rp	Realiasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP PD	A (81,50)	A (81,46)	99,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.437.042.978	5.049.607.393	95,80
						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.188.418	59.189.452	98,34
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.188.418	59.189.452	98,34
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.504.365.292	4.140.611.767	91,92
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.281.945.292	3.937.203.111	91,95
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210.260.000	191.252.336	90,96
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.160.000	12.156.320	99,97
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.331.850	404.298.064	97,34
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.860.400	11.848.840	99,90
						Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	26.086.050	22.800.000	87,40
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.095.090	39.093.965	100,00
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.332.310	27.573.840	97,32
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	4.104.000	76,00
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.005.000	3.427.500	68,48
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.553.000	295.449.919	98,63
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.837.418	235.791.614	95,53
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.400.000	91.355.919	90,09
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.437.418	144.435.695	99,31
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.320.000	209.716.496	99,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	56.600.000	56.029.704	98,99
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	109.700.000	109.686.792	99,99
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.100.000	22.100.000	100,00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.920.000	21.900.000	99,91
2	Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	93	93	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	62.889.550	62.726.100	99,74
						Pembinaan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	6.889.550	6.838.600	99,26
						Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	6.889.550	6.838.600	99,26
						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	56.000.000	55.887.500	99,80
						Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	56.000.000	55.887.500	99,80
3	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	87	88,2	101,37	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	560.793.415	498.994.504	88,98
						Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	299.999.860	276.097.554	92,03
						Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	299.999.860	276.097.554	92,03
						Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	235.000.005	197.138.650	83,89
						Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	210.112.000	187.387.000	89,18
						Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	24.888.005	9.751.650	39,18
						Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	25.793.550	25.758.300	99,86
						Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	25.793.550	25.758.300	99,86
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	62.514.900	53.735.350	85,96
						Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	30.252.000	27.480.350	90,84
						Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	30.252.000	27.480.350	90,84
						Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.262.900	26.255.000	81,38
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	32.262.900	26.255.000	81,38
4	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan	50.694	60.942,69	120,22	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.575.288.307	4.403.263.143	96,24
						Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,danau, Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.989.949	7.699.660	96,37
						Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan	7.989.949	7.699.660	96,37
						Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4.567.298.358	4.395.563.483	96,24
						Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	4.560.026.358	4.389.478.883	96,26
						Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	7.272.000	6.084.600	83,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	374.115.974	369.651.825	98,81
						Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	250.073.350	247.303.000	98,89
						Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	250.073.350	247.303.000	98,89
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	124.042.624	122.348.825	98,63
						Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota	124.042.624	122.348.825	98,63
						TOTAL	11.072.645.124	10.437.978.315	94,27

Sumber :Laporan Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kinerja, Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024, yaitu:

a. Capaian Sasaran

Dari 4 (empat) sasaran strategis, 2 (dua) sasaran strategis dengan capaian melebihi target yaitu pada sasaran strategis Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yaitu 101,37% dan Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan 120,22%. Sedangkan 2 (dua) sasaran strategis yang lainnya dibawah target namun masih dalam predikat **sangat baik** yaitu sasaran terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja dengan capaian 99,95 % dan meningkatnya kualitas inovasi daerah yaitu dengan capaian 93 %,

b. Capaian Indikator

Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai 4 (empat) Indikator kinerja sasaran pada tahun 2023. Capaian masing-masing indikator kinerja yaitu

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perikanan dan Pangan dengan nilai 81,46 (A) dari target 81,50 (A) atau dengan predikat “ baik”.
- 2) Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah 93 dari target nilai 100. pemanfaatan inovasi dalam kegiatan Sosialisasi Gemarikan, karena penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah.

- 3) Hasil pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan realisasi 88,20 dari target yang ditetapkan 87.00 atau dengan capaian 101,37 %. hal ini menunjukkan bahwa semakin beragamnya pangan yang dikonsumsi Masyarakat.
- 4) Produksi Perikanan dengan realisasi 60.942,68 Ton dari target 50.694 Ton dengan capaian 120,22 %.

Capaian rata-rata ke 4 (empat) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 103,63% dengan predikat “ **sangat baik**”

c. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Perikanan dan Pangan pada Tahun Anggaran 2024 adalah **Rp. 11.072.645.124,-** (Sebelas milyar tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah) terealisasi sebesar **Rp. 10.437.978.315,-** (Sepuluh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau sebesar **94,27%**, dengan efisiensi anggaran sebesar **5,73 %**.

Secara umum sasaran yang telah disusun dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah tercapai dengan persentasi capaian 4 indikator dengan predikat **sangat baik**, hal ini tentunya didukung dengan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan masih ditemui sejumlah **kendala/permasalahan – permasalahan** sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan pangan lokal oleh Masyarakat Pesisir Selatan masih sebatas makanan pendamping belum bisa menjadi makanan pengganti beras dan terigu
- 2) Faktor ekonomi dan inflasi, Masyarakat miskin seringkali menghadapi kendala daya beli terhadap bahan pangan yang berkualitas.
- 3) Distribusi pangan yang tidak merata, beberapa wilayah masih mengalami keterbatasan akses terhadap pangan berkualitas.

- 4) Faktor Cuaca dan iklim yang tidak menentu
- 5) Teknologi penangkapan ikan yang dilakukan masih relative sederhana dan pelestarian sumberdaya perikanan di perairan umum maupun lahan pesisir masih belum optimal.
- 6) Kurangnya permodalan nelayan untuk pengembangan penangkapan ikan
- 7) Ketersediaan benih dan induk unggul masih terbatas
- 8) Faktor cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang tahun 2024, yang menyebabkan banjir. Hal ini berpengaruh terhadap usaha budidaya ikan. Diantaranya hanyutnya ikan dan udang yang dibudidayakan di kolam maupun tambak udang.
- 9) Pemanfaatan lahan budidaya secara maksimal, seperti budidaya KJA di laut, budidaya tambak, budidaya air tawar dan budidaya secara intensif.
- 10) Masih rendahnya SDM Masyarakat Pembudidaya dan nelayan.

Upaya kedepan yang akan dilakukan :

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana serta modernisasi alat tangkap ikan yang berwawasan lingkungan guna peningkatan produksi perikanan tangkap
- 2) Kualitas SDM perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai perikanan laut tangkap untuk para nelayan
- 3) Memberikan bantuan induk unggul yang bersertifikat dan bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Pekmbudidaya ikan
- 4) Pembinaan dan penerapan proses cara budidaya dan cara pembenihan ikan yang baik dengan melakukan sosialisasi CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang baik) bagi unit usaha perikanan budidaya
- 5) Peningkatan SDM dan keahlian pembudidaya baik dari sisi manajerial maupun teknik produksi dalam pengelolaan usaha budidaya, sehingga pemanfaatan lahan budidaya bisa lebih optimal. Salah satu upaya adalah dengan melakukan pelatihan maupun penyuluhan

4.2 Saran

Dalam meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka akan dilakukan :

1. Mensinkronkan perencanaan program dan kegiatan serta antisipasinya sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
2. Mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
3. Perlunya peningkatan kompetensi Sumberdaya ASN Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan baik bidang perikanan maupun bidang pangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 ini dibuat, semoga dapat berguna sebagai bahan evaluasi serta pedoman dalam pelaksanaan tugas selanjutnya. Diharapkan dapat menambah informasi/data penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di tahun berikutnya.